



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

#2024
KKP BEYOND



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III 2024

PUSAT PENYULUHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Kuntabel | Kompeten
Harmonis | Loyal | Adaptif | Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan “**Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2024**” dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*.

Penyusunan laporan kinerja mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik *makro* maupun *mikro* serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran, program dan kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan dapat mencapai kemajuan yang cukup besar. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan. Laporan ini

diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan untuk terus meningkatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, **16** Oktober 2024

Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Yayan Hikmayani, S.Pi., M.Si.
NIP. 19671004 199903 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
PENDAHULUAN	2
Latar Belakang	2
Tujuan	4
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	4
Keragaan Pegawai.....	10
Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 2024.....	13
Potensi dan Permasalahan	14
PERENCANAAN KINERJA	18
Rencana Strategis	18
Rencana Kerja Tahun 2024.....	23
Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
Pengukuran Kinerja.....	26
AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024	30
Evaluasi dan Analisis Kinerja	31
Akuntabilitas Keuangan Triwulan III Tahun 2024	75
Efisiensi Anggaran dan Sumber Daya.....	82
PENUTUP	86
Kesimpulan.....	86
Permasalahan dan Tindaklanjut	87
Penutup	88
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keterkaitan visi, misi dan tujuan dalam Renstra BPPSDM KP	20
Tabel 2 Rencana Kerja Pusluh KP TA 2024.....	23
Tabel 3 Penjelasan Revisi Perjanjian Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.....	23
Tabel 4 Anggaran unit kerja dilingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.....	24
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Pusluh KP TA 2024	25
Tabel 6 Bobot validasi IKK	27
Tabel 7 Klasifikasi target indikator kinerja	28
Tabel 8 Status Capaian Nilai Kinerja	28
Tabel 9 Capaian IKK Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2024	32
Tabel 10 Capaian IKK 1- Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2024	36
Tabel 11 Capaian IKK 3-Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang	39
Tabel 12 Rincian capaian Kelompok Pelaku utama / Pelaku Usaha yang Disuluh.....	40
Tabel 13 Capaian IKK 4-Kelompok Kelautan dan Perikanan yang	43
Tabel 14 Rincian capaian Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya	44
Tabel 15 Capaian IKK 5-Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (Kelompok).....	46
Tabel 16 Rincian capaian Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk	47
Tabel 17 Capaian IKK 13- Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	60
Tabel 18 Rincian Dokumen Manajemen Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.....	61
Tabel 19 Perbandingan IKK Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%) dengan Eselon II Lainnya	62
Tabel 20 Capaian IKK 14-Persentase Unit Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	64

Tabel 21 Perbandingan IKK Persentase Unit Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) dengan Eselon II Lainnya	65
Tabel 22 Capaian IKK 17- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	69
Tabel 23 Perbandingan IKK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%) dengan Eselon II Lainnya.....	70
Tabel 24 Rincian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Utama dan Pendukung IK Triwulan III Tahun 2024.....	77
Tabel 25 Kronologi Revisi Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024	5
Gambar 2 Diagram Pie Jumlah Pegawai Lingkup Pusluh KP	10
Gambar 3 Diagram Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Lingkup Pusluh KP	11
Gambar 4 Diagram Sebaran PNS menurut Tingkat Pendidikan.....	12
Gambar 5 Diagram Sebaran PNS Lingkup Pusluh KP dalam rentang umur .	12
Gambar 6 Diagram perbandingan gender pegawai lingkup Pusluh KP	13
Gambar 7 Nilai NKO Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Aplikasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024	30
Gambar 8 Persentase Kelompok yang disuluh berdasarkan keragaan usahanya	41
Gambar 9 Persentase Kelompok yang ditingkatkan kelasnya berdasarkan keragaan usahanya.....	44
Gambar 10 Persentase Kelompok yang dibentuk berdasarkan keragaan usahanya	48
Gambar 11 Perbandingan Capaian Layanan Dukungan Manajemen Internal Triwulan III Tahun 2024 dengan Eselon II Lainnya	62
Gambar 12 Perbandingan Capaian Penerapan Manajemen Pengetahuan unit Eselon II lingkup BPPSDM KP Triwulan III Tahun 2024	65
Gambar 13 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%).....	70

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) merupakan unit Es.2 yang tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan. Pusluh KP dalam upaya untuk meningkatkan pencapaian pembangunan perikanan melalui peningkatan akuntabilitas kinerjanya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, yang diikuti dengan membuat Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja Tahunan secara konsisten, terus menerus, dan berkesinambungan.

Pusluh KP telah menetapkan 4 (empat) sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam Tahun 2024. Keempat sasaran kegiatan tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja kegiatan (IKK). Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sasaran strategis yang dilaksanakan pada Tahun 2024 ini tercapai dengan baik dalam pencapaian progres kegiatan. Hasil Pengukuran capaian kinerja Pusluh KP dengan menggunakan aplikasi *kinerjaku.kkp.go.id* Triwulan III Tahun 2024 menunjukkan capaian Pusluh KP berwarna Biru atau Istimewa dengan nilai **111,21%**.

Pengukuran tersebut diperoleh dari hasil capaian Pusluh KP sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, dengan terukurnya 7 (tujuh) indikator kinerja Pusluh KP yang ditargetkan pada Triwulan ini sebagai berikut:

1. IKK 1–Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan tercapai sebanyak Rp. 2,63 Milyar atau 120,00% dari target Rp. 1,10 Milyar;

2. IKK 3–Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha yang Disuluh tercapai sebanyak 38.060 kelompok atau 110,00% dari target 34.600 kelompok;
3. IKK 4–Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya tercapai sebanyak 1.183 kelompok atau 117,71% dari target 1.005 kelompok;
4. IKK 5–Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk tercapai sebanyak 2.980 kelompok atau 116,18% dari target 2.565 kelompok;
5. IKK 13–Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%) tercapai sebesar 100,00% atatu 100,00% dari target 100,00%;
6. IKK 14–Persentase Unit Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar tercapai sebesar 118,98% atau 120,00% dari target 94%;
7. IKK 17–Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan tercapai sebesar 82% atau 100,00% dari target 82%;

Pusluh KP merupakan organisasi baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Februari 2024, menjadi organisasi di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian realisasi pada Triwulan III pada Tahun sebelumnya.

Dari sisi kinerja keuangan, dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran Pusluh KP Triwulan III Tahun 2024 cukup baik yaitu mencapai Rp.303.574.162.452 atau 67,71% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.448.345.506.000.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dicapai dengan istimewa, yang persentase pencapaiannya digambarkan mengalami kenaikan pada

perkembangan fisik kegiatan dari masing-masing Sasaran Kegiatan di setiap periode waktu baik bulanan maupun triwulanan. Dalam proses pencapaian kinerja, sampai dengan Triwulan III secara keseluruhan tercapai dengan baik walaupun ada beberapa kendala dalam teknis penganggaran untuk kegiatan teknis sebagai konsekuensi terjadinya perubahan organisasi. Kendala tersebut telah tertangani dengan adanya persiapan Perjanjian Kinerja, IKK dan target targetnya yang sampai saat ini masih dalam proses penyelarasan anggaran agar pada triwulan selanjutnya terkendali dengan baik sehingga tidak ada permasalahan yang berarti.



PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut, harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) atau Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPPSDM KP. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-

program jangka panjang dan menengah KKP, khususnya program penyuluhan dan SDM KP, sebagaimana tertuang dalam Renstra BPPSDM KP tahun 2020–2024.

Sebagai salah satu instansi dan penyelenggara negara di lingkup Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BBRSEKP telah menetapkan rencana kerja tahun 2024, melakukan monitoring dan evaluasi, pengukuran kinerja yang telah dicapai, serta penyusunan LKj Pusluh KP Tahun 2024 sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang diemban Pusluh KP.

Acuan dalam penyusunan LKj Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2024 antara lain, yaitu:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
- g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Tujuan

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Negara telah menetapkan target kinerja dan dilakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut kemudian disusun dalam Laporan Kinerja Pusluh KP sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pusluh KP Triwulan III Tahun 2024 ini, yaitu :

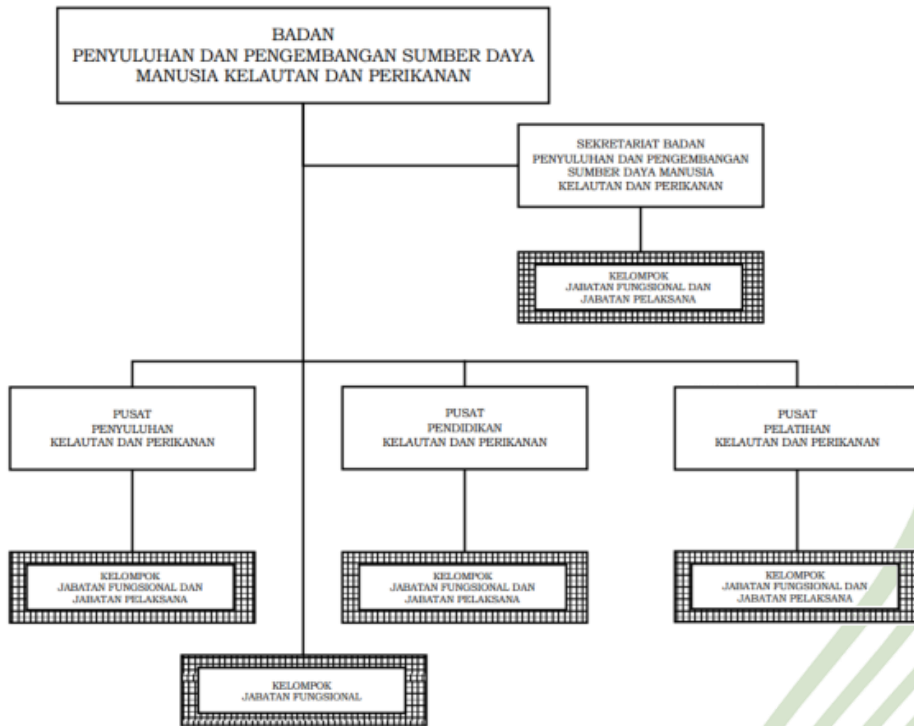
1. sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
2. sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Triwulan III Tahun 2024 dalam upaya memperbaiki kinerja selanjutnya; dan
3. sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan pada tanggal 26 Februari 2024, susunan organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri atas a. Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; b. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan; c. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan; d. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan; dan e. kelompok jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusluh KP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan pendampingan teknis pelaku utama, pembentukan dan pengembangan kelompok pelaku usaha, dan pembentukan badan usaha sektor kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan fasilitasi kelompok pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk mendapatkan perizinan berusaha;
- e. pengembangan percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan rekayasa sosial masyarakat kelautan dan perikanan;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam bentuk Surat Tugas untuk menjadi Ketua dan/atau Anggota Tim Kerja pada Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan Surat Tugas Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan nomor B.4144/BPPSDM.2/KP.440/IV/2024 tanggal 4 April 2024 menyebutkan bahwa memberi tugas kepada seluruh pegawai Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan untuk 1) melaksanakan tugas sebagai Ketua dan/atau Anggota sesuai susunan keanggotaan Tim Kerja serta memastikan pencapaian Indikator Kinerja dan pelaksanaan Uraian Fungsi; 2) menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan; dan 3) segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Susunan Keanggotaan Tim Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan terdiri dari 6 (enam) tim kerja antara lain 1. Tim Kerja Dukungan Manajemen; 2. Tim Kerja Kemitraan, PNBP, dan Humas. 3. Tim Kerja Ketenagaan Penyuluhan; 4. Tim Kerja Penyelenggaraan Penyuluhan; 5) Tim Kerja Kelembagaan Penyuluhan; 6) Tim Kerja Tata Kelola Penyuluhan. Masing-masing tim kerja memiliki ketua dan anggota dalam melaksanakan fungsinya.

Tim Kerja Dukungan Manajemen memiliki fungsi a. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, BMN, administrasi SDM Aparatur, Tata Laksana Organisasi, penyelenggaraan kerumahtanggaan, kearsipan dan persuratan Pusat Penyuluhan KP; b. Koordinasi dan penyusunan perencanaan kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi, dan capaian kinerja Lingkup Pusat Penyuluhan KP; c. Koordinasi terkait Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Penyuluhan KP; d. Pelaksanaan Indeks Profesionalitas ASN Satker Pusat Penyuluhan KP; e. Koordinasi dan pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian terhadap nilai temuan atas hasil pemeriksaan laporan

keuangan Pusat Penyuluhan KP; f. Koordinasi dan pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan KP; g. Penyusunan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)/Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)/Manajemen Risiko (MR) Pusat Penyuluhan KP; h. Koordinasi terkait SAKIP lingkup Pusat Penyuluhan KP; i. Koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, program, penganggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Pusat Penyuluhan KP; j. Koordinasi terkait pelaksanaan anggaran Lingkup Pusat Penyuluhan KP; k. Koordinasi dan pelaksanaan anggaran Satker Pusat Penyuluhan KP; l. Koordinasi dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Satker Pusat Penyuluhan KP; dan m. Koordinasi terkait Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Pusat Penyuluhanh KP. Dalam menjalankan fungsi tersebut juga mendukung 8 (delapan) Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusluh KP, Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusluh KP, Nilai PM SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, dan Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Tim kerja dukungan manajemen terdiri dari 1 (satu) Ketua, dan 56 (lima puluh enam) Anggota yang terdiri dari 30 (tiga puluh) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 26 (dua puluh enam) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Tim Kerja Kemitraan, PNBP dan Humas memiliki fungsi a. Koordinasi terkait kemitraan, diseminasi, publikasi dan pelayanan publik lingkup Pusat Penyuluhan KP; b. pelaksanaan kemitraan, diseminasi, publikasi dan pelayanan publik Satker Pusat Penyuluhan KP; c. Pelaksanaan kegiatan direktif Eselon I; d. Koordinasi terkait PNBP Lingkup Pusat Penyuluhan KP; e. Koordinasi terkait Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek (Desa) Lingkup Pusat

Penyuluhan KP; dan f. Persentase unit kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Dalam menjalankan fungsi tersebut juga mendukung 5 (lima) Indikator Kinerja seperti Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan KP, Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek, Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang mendapatkan percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan, Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek, dan Persentase unit kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Tim kerja Kemitraan, PNBP dan Humas terdiri dari 1 (satu) Ketua, dan 7 (delapan) Anggota yang terdiri dari 3 (tiga) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 4 (empat) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Tim Kerja Ketenagaan Penyuluhan memiliki fungsi a. Koordinasi terkait persentase Penyuluh Perikanan PNS yang lulus penilaian kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional lingkup Pusat Penyuluhan KP; b. Koordinasi terkait tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Penyuluhan KP; dan c. Koordinasi terkait Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT Lingkup Pusat Penyuluhan KP. Dalam menjalankan fungsi tersebut juga mendukung 2 (dua) Indikator Kinerja seperti Penyuluh Perikanan PNS yang Bersertifikat dan Tenaga Kerja yang terlibat lingkup Pusat Penyuluhan KP. Tim kerja Ketenagaan Penyuluhan terdiri dari 1 (satu) Ketua, dan 5 (lima) Anggota yang terdiri dari 2 (dua) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3 (tiga) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Tim Kerja Penyelenggaraan Penyuluhan memiliki fungsi a. Koordinasi terkait Jumlah Penyuluh yang Mendampingi Program Prioritas KKP; dan b. Koordinasi terkait Jumlah program lintas sektor yang didampingi oleh Penyuluh Perikanan (program) Lingkup Pusat Penyuluhan KP. Dalam menjalankan fungsi tersebut juga mendukung 2 (dua) Indikator Kinerja seperti Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk dan Penyuluh yang mendampingi program lintas sektor dan prioritas. Tim kerja Penyelenggaraan Penyuluhan terdiri dari 1 (satu) Ketua, dan 6 (enam) Anggota yang terdiri dari 5 (lima) Aparatur Sipil

Negara (ASN) dan 1 (satu) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

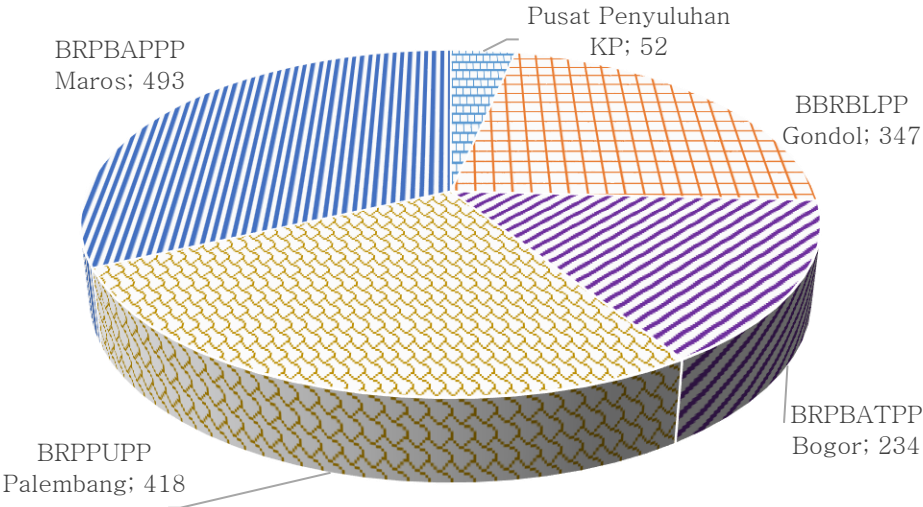
Tim Kerja Kelembagaan Penyuluhan memiliki fungsi a. Koordinasi terkait Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh (Kelompok) Lingkup Pusat Penyuluhan KP; dan b. Koordinasi terkait Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok) Pusat Penyuluhan KP. Dalam menjalankan fungsi tersebut juga mendukung 2 (dua) Indikator Kinerja seperti Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya dan kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang disuluh. Tim kerja Kelembagaan Penyuluhan terdiri dari 1 (satu) Ketua, dan 6 (enam) Anggota yang terdiri dari 5 (lima) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 1 (satu) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Tim Kerja Tata Kelola Penyuluhan memiliki fungsi a. Koordinasi terkait Jumlah kelompok pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang difasilitasi untuk mendapatkan perizinan berusaha (kelompok) Lingkup Pusat Penyuluhan KP; dan b. Koordinasi terkait Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK) Lingkup Pusat Penyuluhan KP. Dalam menjalankan fungsi tersebut juga mendukung 2 (dua) Indikator Kinerja seperti fasilitasi kelompok pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk mendapatkan perizinan berusaha dan jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria yang disusun. Tim kerja Kelembagaan Penyuluhan terdiri dari 1 (satu) Ketua, dan 3 (tiga) Anggota yang terdiri dari 5 (lima) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3 (tiga) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dibantu oleh unit pelaksana teknis yaitu Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP); Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP); Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP); Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP). Selain unit pelayanan teknis diatas, ada beberapa unit kerja lainnya yang mempunyai fungsi penyuluhan kelautan dan perikanan. Beberapa unit

pelayanan teknis kerja lainnya yang juga melaksanakan program penyuluhan kelautan dan perikanan antara lain Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan; Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal; Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi; Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon; Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung.

Keragaan Pegawai

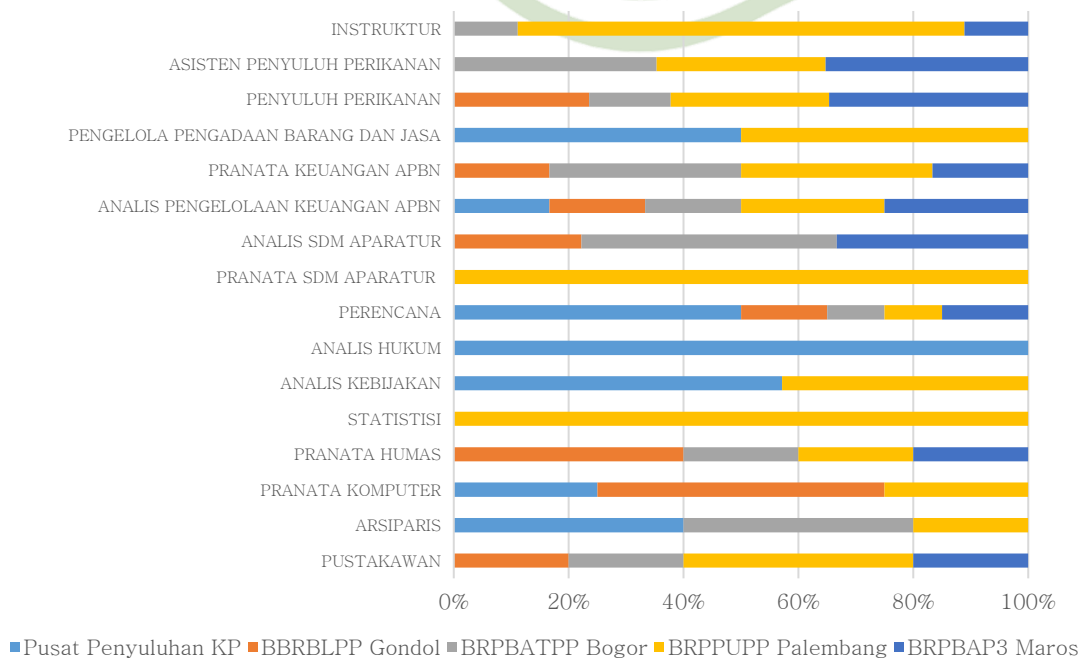


Gambar 2 Diagram Pie Jumlah Pegawai Lingkup Pusluh KP

Jika dilihat dari gambar keragaan pegawai, pegawai lingkup Pusluh KP sampai dengan Bulan Juni 2024 berjumlah 2185. Dengan jumlah PNS sebanyak 1265 orang, PPPK sebanyak 279 orang, PPNPN sebanyak 103, PPB sebanyak 479 orang; dan PJLP sebanyak 59 orang. Dengan jumlah pegawai terbanyak adalah BRPBAPPP Maros sebanyak 493 ASN dan 174 tenaga kontrak.

Dari jumlah ASN yang ada di lingkup Pusluh KP diperoleh komposisi jumlah pegawai yang merupakan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 92% dari total pegawai dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 8% dari total pegawai. Jumlah pegawai yang merupakan JFT diperoleh sebanyak 1412 pegawai.

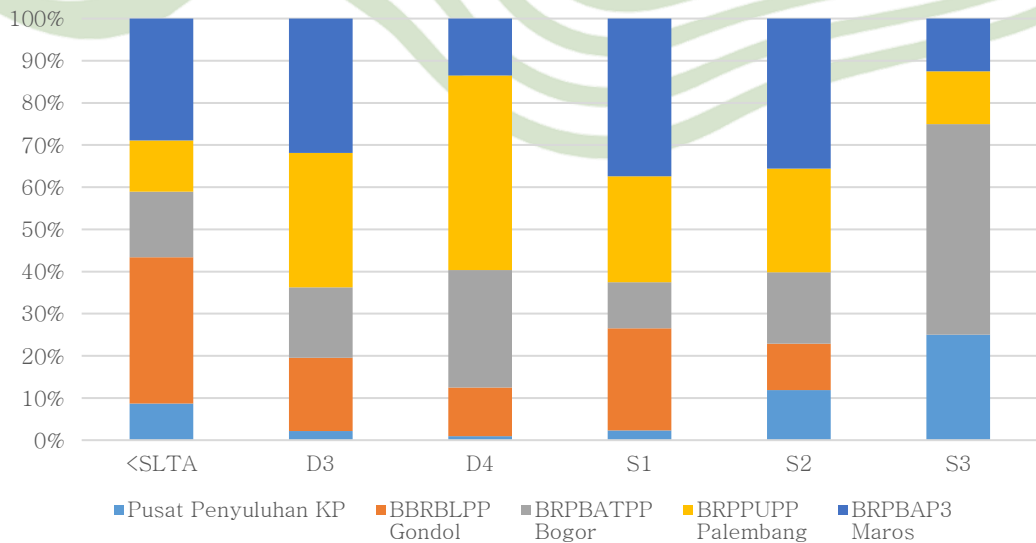
Sehingga komposisi dan jumlah jabatan fungsional tertentu seperti di Gambar berikut ini:



Gambar 3 Diagram Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Lingkup Pusluh KP

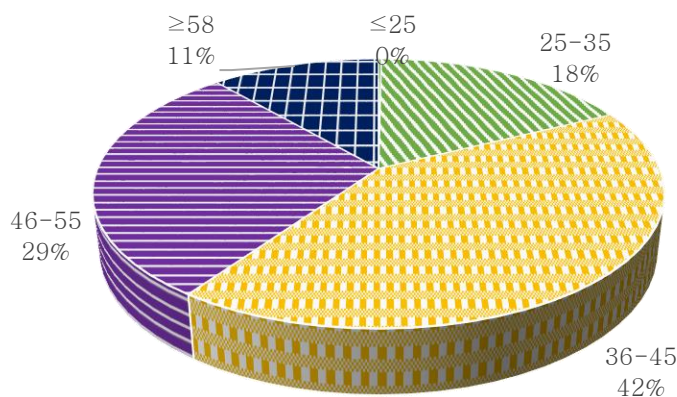
Dapat dilihat pada Gambar diatas terdapat 16 (enam belas) jabatan fungsional tertentu yang diemban oleh pegawai di lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Dengan jumlah jabatan fungsional terbanyak adalah Penyuluh Perikanan.

Apabila dilihat dari jenjang pendidikan, dari data per Bulan Juni 2024, menurut tingkat pendidikan: S3 sebanyak 8 orang, S2 sebanyak 118 orang, S1 sebanyak 724 orang, D4 sebanyak 104 orang, D3 sebanyak 138 orang, dan ≤ SMA sebanyak 173 orang. Seperti yang dapat dilihat dari Gambar dibawah. Hanya beberapa satuan kerja yang memiliki pegawai dengan tingkat Pendidikan strata 3 atau doctoral, sedangkan masih banyak pegawai di tingkat SLTA sampai dengan D3 atau diploma.



Gambar 4 Diagram Sebaran PNS menurut Tingkat Pendidikan Lingkup Pusluh KP

Sebagai upaya dalam meningkatkan jenjang pendidikan pegawai Lingkup Pusluh KP maka dilaksanakan tugas belajar bagi ASN Lingkup Pusluh KP. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan diberhentikan/dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai PNS.

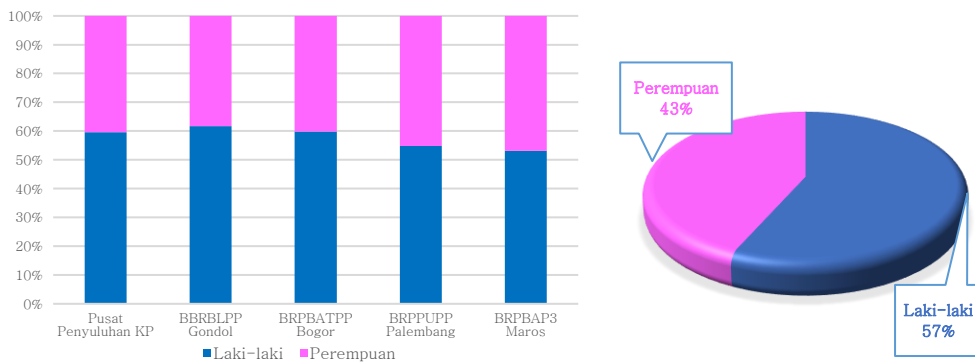


Gambar 5 Diagram Sebaran PNS Lingkup Pusluh KP dalam rentang umur

Sebaran pegawai dengan rentang umur tertentu dapat dilihat pada Gambar diatas. Apabila dilihat dari rentang umur pegawai lingkup

Pusluh KP dapat dilihat bahwa rentang umur dengan jumlah pegawai terbanyak adalah pada rentang umur 36-45 Tahun sebanyak 650 pegawai. Sedangkan rentang umur dengan jumlah pegawai yang paling sedikit adalah rentang umur dibawah 25 Tahun sebanyak 3 pegawai.

Apabila dilihat dari sisi gender, pegawai di lingkup Pusluh KP secara umum, proporsi jumlah laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan, baik secara lingkup Pusluh KP maupun pada masing-masing unit kerja. Sebaran pegawai berdasarkan gender dapat dilihat pada Gambar dibawah.



Gambar 6 Diagram perbandingan gender pegawai lingkup Pusluh KP

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 2024

Sistem Penyajian Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban yang dapat menggambarkan kinerja instansi pemerintah secara jelas dan transparan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), mengenai keberhasilan/kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan Kinerja Tahunan ini berisi pertanggungjawaban kinerja Pusluh KP dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan Kinerja (LKj) ini mengkomunikasikan capaian kinerja (*Performance Results*) 2024 sendiri dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2024 yang tertuang dalam Penetapan Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana dan atau penetapan kinerja

(komitmen kinerja) yang telah dilakukan akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang dengan membandingkan hasil. Demikian pula akan disajikan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan selama Tahun berjalan, selain juga melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja. Dalam mengaitkan dengan anggaran maka, realisasinya akan digunakan untuk membahas perwujudan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Adapun sistemetika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Tahun 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang BPPSDM seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di Pusluh KP.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis Pusluh KP 2020–2024, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Pusluh KP Tahun 2024 serta Pengukuran Kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator–indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.
6. **Lampiran**, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.

Potensi dan Permasalahan

Kegiatan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana riset yang sebagian besar

sudah mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Laboratorium Penguji karena telah menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005). Riset Perikanan memiliki: laboratorium biologi, data, limnologi, dan oseanografi, serta kapal riset (perikanan tangkap); laboratorium basah, biologi, kimia, penyakit, bioteknologi, *multi species hatchery*, *biosecurity hatchery*, pakan, patologi dan kesehatan ikan, nutrisi dan bioteknologi, tanah, air dan biologi, *feed processing*, reproduksi, basah (*hatchery*) dan pakan alami (perikanan budidaya), uji numerik dan uji fisik. Selain itu seluruh unit kerja di lingkungan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan memiliki aset berupa kolam yang sebelumnya merupakan kolam uji riset, saat ini dilakukan optimalisasi aset secara bertahap untuk meningkatkan PNPB maupun untuk menunjang kegiatan *Smart Fisheries Village* (SFV) yang merupakan kegiatan unggulan BPPSDM.

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program penyuluhan kelautan dan perikanan untuk mendukung pembangunan KP bisa dijabarkan menjadi dua aspek, yaitu aspek pelaku utama/usaha yang menjadi sasaran penyuluhan dan juga aspek ketenagaan penyuluh perikanannya sendiri. Pada aspek pelaku utama/usaha yang menjadi sasaran utama penyuluhan perikanan diantaranya a) tingkat pendidikan dan kompetensi relatif rendah; b) Usaha yang dikembangkan masih secara parsial dengan teknologi terapan konvensional; c) Skala luasan usaha kecil, individual dan variatif, tersebar tidak dalam suatu kawasan/wilayah pengembangan; d) Produk yang dihasilkan sebagian besar dalam bentuk produk primer.

Sedangkan aspek ketenagaan penyuluh perikanan, dimana Penyuluh Perikanan sangat berperan dalam pengenalan potensi wilayah dan sosial budaya, serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan, juga dihadapkan pada berbagai permasalahan yang cukup krusial diantaranya a) Jumlah Penyuluh Perikanan yang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah pelaku utama yang memerlukan pembinaan dan pendampingan; b) Masih terjadi alih tugas

penyuluh perikanan PNS menjadi jabatan lainnya; c) Kompetensi sebagian penyuluh perikanan masih belum sesuai kebutuhan di lapangan; d) Penyebaran jumlah penyuluh perikanan relatif tidak merata di semua kabupaten/kota yang memiliki potensi perikanan;



PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu kementerian ekonomi, pada hakekatnya tercermin dari seluruh kebijakannya yang diarahkan dalam kerangka pembangunan ekonomi. Komponen utama ekonomi kelautan dan perikanan menyangkut dengan persoalan produksi dan pendapatan yang harus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi BPPSDM pada Tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Misi

Misi BPPSDM adalah menjalankan misi Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, KKP mendukung 4 (empat) misi yaitu:

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BPPSDM KP, maka tujuan yang ingin dicapai selama Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

1. Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani;
2. Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan;
3. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing;

4. Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan;
5. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 1 Keterkaitan visi, misi dan tujuan dalam Renstra BPPSDM KP 2020–2024

Visi	Misi	Tujuan
Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong	Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	1. Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
	Misi 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.
	Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	3. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
	Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	4. Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan.
		5. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik

Arah Kebijakan

Arah kebijakan menetapkan agenda prioritas dalam rangka pemulihan kesehatan laut serta percepatan pertumbuhan ekonomi kelautan berkelanjutan dengan 5 strategi kebijakan

- 1) Memperluas Kawasan Konservasi Laut,
- 2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota,
- 3) Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan,

- 4) Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,
- 5) Pembersihan Sampah Plastik, melalui Gerakan partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Kunci keberhasilan penerapan ekonomi biru (*blue economy*) dimaksud adalah ketersediaan SDM Unggul yang akan didukung melalui strategi sinergi kegiatan BPPSDM dalam bentuk *Vocational Goes to Actor* (VOGA), pelatihan, dan sertifikasi kelautan dan perikanan.

VOGA sebagai salah satu program prioritas BPPSDM yang mengkolaborasikan tiga fungsi BPPSDM, yaitu pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk mendukung transformasi pendidikan vokasi KKP yang berbasis kompetensi dengan penerapan kepada masyarakat KP dilakukan langsung di lokasi pengembangan program prioritas KKP. Implementasi VOGA dituangkan dalam kegiatan: Kampung Nelayan Modern (Kalamo), dan lokasi potensi perikanan lainnya melalui strategi VOGA berkonsep *Smart Fisheries Village* (SFV). Implementasi SFV BPPSDM tahun 2024 yaitu; 1) penguatan/penyesuaian juklak SFV, 2) penguatan 10 (sepuluh) SFV Desa lanjutan 2023, 3) pengembangan 1 (satu) SFV Desa 2024, 4) dukungan pembangunan Bale SFV di 4 (empat) lokasi Kalamo, serta 5) penguatan 20 (dua puluh) SFV UPT dalam rangka optimalisasi aset dan peningkatan PNBPN.

BPPSDM berkomitmen untuk melakukan dukungan kegiatan penyuluhan terhadap program prioritas KKP melalui 1) pendampingan oleh penyuluh perikanan pada program prioritas KKP, 2) penyiapan *road map* penyuluhan tahun 2024-2029, 3) penguatan sistem informasi penyuluhan 4) reviu NSPK terkait penyuluhan dan 5) penguatan penguasaan metodologi penyuluhan untuk penyuluh perikanan.

Sasaran

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP terdiri dari :

- SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
- SS-2 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
- SS-3 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat
- SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat
- SS-5 Tatakelola SDKP bertanggung jawab
- SS-6 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing
- SS-7 Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif
- SS-8 Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas

Dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BPPSDM Tahun 2020-2024, maka sasaran program (SP) yang akan dicapai BPPSDM pada Tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran strategis KKP adalah sebagai berikut :

- SP-1 SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri
- SP-2 SDM KP Peserta Diklat untuk Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)
- SP-3 Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan
- SP-4 Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat
- SP-5 Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan
- SP-6 Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM

Sedangkan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sendiri memiliki sasaran kegiatan (SK) yang akan dicapai Tahun 2024 mengacu pada sasaran program BPPSDM (SP-6) yang diturunkan dari sasaran strategis KKP (SS-8) yaitu :

- SK-1 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
- SK-2 Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

SK-3 Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria pelatihan dan penyuluhan

SK-4 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Rencana Kerja Tahun 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, mision, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja Pusluh KP Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2 Rencana Kerja Pusluh KP TA 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp. 000)	ANGGARAN Rev-1 (Rp. 000)	ANGGARAN Rev-2 (Rp. 000)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM	128.950.000	351.279.425	351.279.425
2	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan		102.965.225	102.965.225
Total Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024		128.950.000	454.244.650	454.244.650
Tanggal Pengesahan		27 Desember 2023	2 April 2024	7 Agustus 2024

Perjanjian kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah di revisi sebanyak 1 (satu) kali sepanjang Tahun 2024. Berikut tabel penjelasan revisi Perjanjian Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Tabel 3 Penjelasan Revisi Perjanjian Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

No	Poin Perubahan	Sebelum Revisi	Setelah Revisi
I.	Revisi I		
1.	Perubahan Pejabat Penandatanganan Pihak Kesatu	Pjt. Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Hendra Yusran Siry	Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Yayan Hikmayani
2.	Bulan penandatanganan Perjanjian Kinerja	2 April 2024	7 Agustus 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

dengan Kepala BPPSDMKP. Penetapan kinerja Pusluh KP Tahun 2024 atau Perjanjian Kinerja ini memuat sasaran dan target indikator kinerja kegiatan (IKK). IKK tersebut merupakan salah satu Program Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan program dari indikator tersebut didukung oleh 2 (dua) kegiatan yakni kegiatan dukungan manajemen internal lingkup BPPSDM (2378) dan kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (2375) yang terdapat pada seluruh unit kerja dilingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan rincian anggaran antara lain.

Tabel 4 Anggaran unit kerja dilingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

NO	SATKER	PAGU (Rp.) April 2024	PAGU (Rp.) Agustus 2024
1	Pusat Penyuluhan KP	35.338.034.000	35.338.034.000
2	BBRBL-PP Gondol	76.500.609.000	76.500.609.000
3	BRPBAP-PP Maros	110.071.024.000	110.071.024.000
4	BRPBAT-PP Bogor	93.458.914.000	93.458.914.000
5	BRPPUP-PP Palembang	86.207.989.000	86.207.989.000
6	BPPP Medan	13.956.180.000	13.956.180.000
7	BPPP Tegal	10.484.200.000	10.484.200.000
8	BPPP Banyuwangi	12.137.340.000	12.137.340.000
9	BPPP Bitung	7.379.020.000	7.379.020.000
10	BPPP Ambon	8.711.340.000	8.711.340.000
TOTAL		454.244.650.000	454.244.650.000

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Pusluh KP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala Pusluh KP dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pada perjanjian kinerja tersebut terdapat 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Untuk sasaran kegiatan yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Keseluruhan IKK Pusluh KP pada Tahun 2024 untuk semua SK berjumlah 21 (dua puluh satu) IKK. Sebagai alat ukur

pencapaian SK, target 21 (dua puluh satu) IKK Pusluh KP yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Pusluh KP TA 2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET April	TARGET Agustus
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Rupiah Milyar)	2,293	2,293
		2	Penyuluh Perikanan PNS yang Bersertifikat Kompetensi (%)	50	50
		3	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh (Kelompok)	47.500	47.500
		4	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok)	2.000	2.000
		5	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (Kelompok)	4.000	4.000
		6	Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Orang)	12.283	12.283
		7	Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendapatkan Perizinan Berusaha (Kelompok)	100	100
		8	Penyuluh yang Mendampingi Program Lintas Sektor dan Prioritas KKP (Orang)	2.100	2.100
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Desa/Kawasan Mitra yang Menerapkan Iptek (Desa)	14	14
		10	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	35	35
3	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan	11	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang Disusun (NSPK)	4	4
4	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	12	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	13	13
		13	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	100	100

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET April	TARGET Agustus
	14	Persentase Unit Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94	94
	15	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)	81	81
	16	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas LK Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	≤ 0,5	≤ 0,5
	17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	82	82
	18	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	81	81
	19	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	94	94
	20	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	93,76	93,76
	21	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	82	82

Pengukuran Kinerja

Nilai kinerja adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKK. Status capaian yang ditunjukkan dengan pewarnaan ditentukan dari perbandingan antara capaian dengan target. Untuk menghitung nilai kinerja perlu diperhatikan bobot masing-masing IKK dengan sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKK, terdiri dari Outcome, Output Kendali Rendah, Output Kendali Tinggi, dengan bobot seperti tabel berikut:

Tabel 6 Bobot validasi IKK

No	Validitas IKU	Bobot
1	Outcome	5
2	Output Kendali Rendah	3
3	Output Kendali Tinggi	2

Tingkat validitas diatas memiliki bobot yang berbeda didasarkan oleh karakter indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Validitas Outcome yaitu hasil/manfaat/dampak yang diharapkan oleh stakeholder/customer pemilik indikator dalam jangka pendek, menengah atau panjang.
2. Validitas Output Kendali Rendah yaitu yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan selain pemilik indikator.
3. Validitas Output Kendali Tinggi yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator.

Selanjutnya ditentukan pola perhitungan indikator kinerja. Pola Perhitungan terdiri dari Akumulasi, Rata-rata dan Nilai Posisi Akhir. Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan mensepakati standar status kinerja untuk nilai kinerja dengan klasifikasi polarisasi. Polarisasi terdiri dari *Maximize*, *Minimize*, atau *Stabilize*. *Maximize* yaitu semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, semakin rendah kinerja semakin buruk. *Minimize* yaitu semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, semakin tinggi semakin buruk. *Stabilize* yaitu semakin Stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin baik. Berikut klasifikasi polarisasi yang ditentukan:

Tabel 7 Klasifikasi target indikator kinerja

KLASIFIKASI			STATUS KINERJA (Toleransi 0%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
$X < 50\%$	$X > 50\%$	$X > 50\%$ atau $X < 50\%$	Sangat Kurang
$X = 50\% - < 70\%$	$X = 50\% - > 70\%$	-	Kurang
$X = 70\% - < 90\%$	$X = 70\% - > 90\%$	-	Cukup
$X = 90\% - < 120\%$	$X = 90\% - > 120\%$	$X = 100\%$	Baik
$X \geq 110\%$	$X \leq 120\%$	-	Sangat Baik

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah: *Maximize* adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Minimize* adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Stabilize* adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Status capaian nilai kinerja ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Tabel 8 Status Capaian Nilai Kinerja

Warna	Keterangan
Istimewa	Nilai 110-120
Baik	Nilai 90-<110
Cukup	Nilai 70-<90
Kurang	Nilai 50-<70
Sangat Kurang	Untuk Nilai <50
Belum Ada Penilaian	



AKUNTABILITAS KINERJA



INFINITY

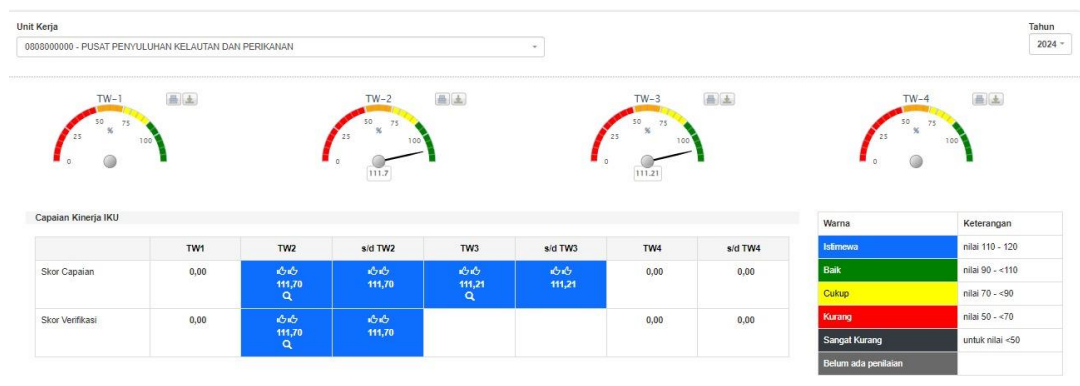
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) mendapatkan mandat untuk melaksanakan 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) dan mencapai target 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Nilai pencapaian kinerja pada Tahun 2024 dari Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) memiliki kinerja yang baik (di atas target yang telah ditetapkan). Pencapaian terhadap target kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 ini walau terdapat Blokir AA terkait kegiatan dukungan manajerial, namun masih dapat melaksanakan kegiatan.

Hasil Pengukuran capaian kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) dengan menggunakan aplikasi *kinerjaku.kkp.go.id* menunjukkan capaian Triwulan III Tahun 2024 berwarna biru dengan nilai 111,21% dalam kategori Istimewa (110-120). Terpenuhinya capaian kinerja juga didukung oleh sataun kerja dibawah Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dan seluruh pegawai Lingkup Pusluh KP dalam memenuhi kinerja yang telah ditetapkan.



Gambar 7 Nilai NKO Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Aplikasi Kinerjaku Triwulan III Tahun 2024

Pusluh KP merupakan organisasi baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Februari 2024, menjadi organisasi di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sehingga pada aplikasi Kinerja triwulan III tahun 2024 tidak memiliki nilai NKO.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pusat penyuluhan Kelautan dan perikanan (Pusluh KP) merupakan organisasi baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Februari 2024, menjadi salah satu organisasi di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Walaupun menjadi organisasi baru, Pusluh KP juga dituntut dalam pengukuran kinerja sesuai peraturan tersebut.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pusluh KP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2024 dapat tercapai.

Capaian IKK Pusluh KP

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pusluh KP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja kegiatan (IKK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis yang dituangkan pada penetapan kinerja Pusluh KP Tahun 2024 dapat tercapai. Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 9 Capaian IKK Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN	TARGET TW III	CAPAIAN TW III	%		
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Nilai PNPB Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Rupiah Milyar)	2,293	1,10	2,63	120,00	
		2	Penyuluh Perikanan PNS yang Bersertifikat Kompetensi (%)	50	-	-	-	
		3	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh (Kelompok)	47.500	34.600	38.060	110,00	
		4	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok)	2.000	1.005	1.183	117,71	
		5	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (Kelompok)	4.000	2.565	2.980	116,81	
		6	Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Orang)	12.283	-	-	-	
		7	Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendapatkan Perizinan Berusaha (Kelompok)	100	-	-	-	

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN	TARGET TW III	CAPAIAN TW III	%
		8	Penyuluh yang Mendampingi Program Lintas Sektor dan Prioritas KKP (Orang)	2.100	-	-	-
2	Terseleenggaranya Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Desa/Kawasan Mitra yang Menerapkan Iptek (Desa)	14	-	-	-
		10	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	35	-	-	-
3	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan	11	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang Disusun (NSPK)	4	-	-	-
4	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	12	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	13	-	-	-
		13	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	100	100,00
		14	Persentase Unit Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94	94	118,98	120,00
		15	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)	81	-	-	-
		16	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas LK Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	≤ 0,5	-	-	-

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN	TARGET TW III	CAPAIAN TW III	%	
	17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	82	82	82	100,00
	18	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	81	-	-	-
	19	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	94	-	-	-
	20	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	93,76	-	-	-
	21	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	82	-	-	-

Sumber : Kinerjaku Pusluh KP

SASARAN KEGIATAN 1

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Sasaran kegiatan Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja. Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan beberapa indikator yang ditargetkan di Triwulan III Tahun 2024 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1

Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Rupiah Milyar)

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau

badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Dasar hukum a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, b. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, c. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Indikator kinerja ini diperoleh dari total penerimaan negara bukan pajak sumberdaya alam dengan penerimaan bukan pajak lainnya. Merupakan indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan polarisasi *maximize*. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode triwulanan, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa data realisasi pendapatan dari aplikasi Omspan per tanggal 10 bulan berikutnya dan/atau surat penyampaian realisasi PNBP dari Sekretariat BPPSDM KP.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target 2,293 (dua koma dua ratus sembilan puluh tiga) Rupiah Milyar. Capaian Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Rupiah Milyar) tersaji pada tabel berikut.

Tabel 10 Capaian IKK 1- Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2024

Realisasi TW III				Tahun 2024					Renstra Pusluh KP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian TW III	% Kenaikan TW III 2023-2024	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
-	-	-	-	2.293	1,10	2,63	120,00	-	2.293	144,85

*Organisasi Baru di Tahun 2024

Pada Triwulan III Tahun 2024 ini, IKK Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah tercapai sebesar 2,63 Rupiah Milyar dari target Triwulan III Tahun 2024 sebesar 1,10 Rupiah Milyar atau terealisasi 239%, karena pada aplikasi kinerja nilai toleransi maksimal adalah 120,00% sehingga persentase capaiannya adalah 120,00%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024 telah tercapai melebihi target jangka menengahnya sebesar 144,85% dari target 2,293 (dua koma dua ratus sembilan puluh tiga) rupiah milyar. Pusluh KP merupakan organisasi baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Februari 2024, menjadi organisasi di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian realisasi pada Triwulan III pada Tahun sebelumnya.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini didukung dari optimalisasi lahan riset berupa lahan budidaya, laboratorium, gedung bangunan. Selain itu, didukung pula dengan sumber daya alam pelayanan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Sehingga diperolehnya pendapatan dari beberapa penerimaan negara baik penerimaan fungsional dan penerimaan umum. Selain itu, dengan adanya kontrak kinerja untuk penerimaan PNBP sehingga dapat memacu pendapatan dari setiap satuan kerja. Didukung

juga komitmen pimpinan unit kerja dan kesanggupan tim kerja dalam kegiatan dalam mencapai target PNBP.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini adalah telah dilakukan pendataan sarana prasarana riset yang baik di lingkup Pusluh KP dan pengoptimalan kegiatan dalam penggunaan sarana dan prasarana. Sehingga memperoleh pendapatan penjualan hasil pertanian, Perkebunan, peternakan, dan budidaya, pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan. Selain itu, dilakukannya pemantauan dan evaluasi setiap bulannya. Agar kontrak kinerja yang ditargetkan dapat tercapai dengan baik.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2

Penyuluh Perikanan PNS yang Bersertifikat Kompetensi (%)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Penyuluh KP yang mengikuti uji kompetensi sesuai dengan persyaratan uji kompetensi. Peserta yang mendapatkan sertifikat kompetensi adalah yang sudah dinyatakan lulus sesuai dengan persyaratan dan ujian. Sertifikat dikeluarkan oleh Biro SDMAO KKP.

Indikator kinerja ini diperoleh dari perhitungan persentase penyuluh yang lulus sertifikasi kompetensi di wilayah kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Merupakan indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan polarisasi *maximize*. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode tahunan, yang dilaksanakan oleh seluruh SATMINKAL Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa data peserta sertifikasi kompetensi *by name by address* beserta link sertifikat/surat keterangan dari Biro SDMAO KKP atau Lembaga sertifikasi lainnya. Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target 50 (lima puluh) persen. Pada Triwulan III Tahun 2024 ini, IKK Penyuluhan Perikanan PNS yang Bersertifikat Kompetensi (%) belum memiliki target capaian, capaian target tersebut akan diperoleh pada akhir

tahun. Pusluh KP merupakan organisasi baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Februari 2024, menjadi organisasi di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Namun dapat disampaikan progress yang dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 ini dilakukan proses perencanaan penjadwalan ujian kompetensi yang akan dilakukan.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3

Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh (Kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/ pelaku usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan. Pelaksanaan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari pembinaan masyarakat diwilayahnya.

Setiap kelompok memiliki kode Registrasi sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Kepala BRSDM KP Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Administrasi dan Profil Kelompok Kelautan dan Perikanan. Contoh Kode Registrasi Kelompok : 2.1.12.05.0109.0214

- 2 : Menjelaskan Kelas Kelompok (Pemula, Madya, Utama)
- 1 : Menjelaskan Jenis Usaha Kelompok (Budidaya, Penangkapan, Pengolahan/Pemasaran, Garam, Pengawasan/Konservasi)
- 12 : Menjelaskan lokasi Provinsi (Provinsi)
- 5 : menjelaskan lokasi Kabupaten/Kota (d disesuaikan dengan kodefikasi pada masing- masing wilayah)
- 0109 : bulan dan tahun terbentuk
- 0214 : bulan dan tahun dikukuhkan

Indikator kinerja ini diperoleh dari jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah disuluh yang disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil yang disahkan oleh Kepala Dinas atau Koordinator penyuluh serta Kepala SATMINKAL penyuluhan. Merupakan indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali tinggi, dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan polarisasi *maximize*. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode triwulanan, yang dilaksanakan oleh seluruh SATMINKAL Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa data Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang disuluh oleh penyuluh perikanan yang disahkan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, sebagaimana matrik. Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target 47.500 (empat puluh tujuh ribu lima ratus) kelompok. Capaian Kelompok Pelaku utama / Pelaku Usaha yang Disuluh (Kelompok) tersaji pada tabel berikut.

Tabel 11 Capaian IKK 3–Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh (Kelompok)

IKK 3– Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh (Kelompok)											
Realisasi TW III				Tahun 2024					Reviu Renstra Puslatluh KP 2020–2024		
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian TW III	% Kenaikan TW III 2023–2024	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024	
44.416	43.303	39.144	36.911	47.500	34.600	38.060	110,00	3,11	47.500	80,13	

*Organisasi Baru di Tahun 2024

*Capaian 2020–2023 (Puslatluh)

Pada Triwulan III Tahun 2024 ini, IKK Kelompok Pelaku utama / Pelaku Usaha yang Disuluh (Kelompok) telah tercapai sebanyak 38.060 (tiga puluh delapan ribu enam puluh) kelompok dari target Triwulan III Tahun 2024 sebesar 34.600 (tiga puluh empat ribu enam ratus)

kelompok atau terealisasi 80,13%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah 2020–2024 telah tercapai sebesar 80,13% dari target 47.500 (empat puluh tujuh ribu lima ratus) kelompok. Pusluh KP merupakan organisasi baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Februari 2024, menjadi organisasi di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian realisasi pada Triwulan III pada Tahun sebelumnya.

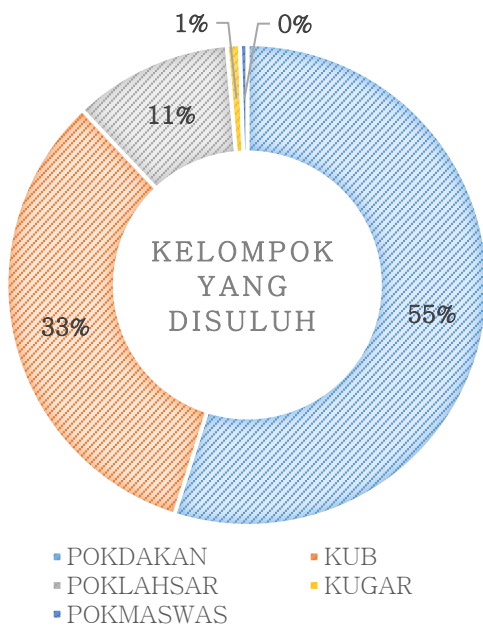
Namun apabila dibandingkan dengan capaian Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh) sebagai yang mengemban indikator kinerja ini di tahun sebelumnya, indikator kinerja ini mengalami penurunan sebesar 3,11% dari capaian triwulan III tahun 2023 yang lalu sebesar 36.911 kelompok. Peningkatan ini dipengaruhi oleh dorongan pimpinan dalam pencapaian indikator kinerja dan didukung dengan kesiapan penyuluh untuk melengkapi profil kelompok dengan sesuai maupun belum melampirkan SK pengukuhan dan piagam pengukuhan sesuai manual iku.

Rincian capaian Kelompok Pelaku utama / Pelaku Usaha yang Disuluh (Kelompok) sebagai berikut :

Tabel 12 Rincian capaian Kelompok Pelaku utama / Pelaku Usaha yang Disuluh

	Saminkal	Target	Capaian	%
1	BBRBLPP Gondol	3.000	3.560	118,67
2	BRPBAPPP Maros	6.850	7.498	109,45
3	BRPBATPP Bogor	2.600	2.653	100,00
4	BRPPUPP Palembang	3.600	4.157	115,47
5	BPPP Medan	4.750	5.557	116,99
6	BPPP Tegal	4.750	4.750	100,00
7	BPPP Banyuwangi	4.500	4.700	104,44
8	BPPP Bitung	2.350	2.350	100,00
9	BPPP Ambon	2.200	2.835	120,00
	Total	34.600	38.060	110,00

Berdasarkan rincian capaian kelompok disuluh per SATMINKAL, diperoleh kontribusi terbanyak dari SATMINKAL BRPBAPPP Maros dengan 7.498 (tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh delapan)



Gambar 8 Persentase Kelompok yang disuluh berdasarkan keragaan usahanya

kelompok yang disuluh. Apabila dari total rincian capaian kelompok yang disuluh dibagi berdasarkan keragaan usahanya terdiri dari Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) berjumlah 20.898 kelompok, Kelompok Usaha Bersama (KUB) berjumlah 12.582 kelompok, Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar) berjumlah 4.061 kelompok, Kelompok Usaha Garam (KUGAR) berjumlah 332 kelompok, dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) berjumlah 187 kelompok.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini didukung dari kualifikasi penyuluh perikanan yang kompeten, menguasai ilmu-ilmu baru, inovatif, terampil, solutif, serta mampu membimbing kelompok yang disuluh. Selain itu, terbitnya peraturan Kepala BRSDM KP No.60 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Penyuluh Perikanan, Asisten Penyuluh Perikanan, Penyuluh Perikanan PPPK, Penyuluh Perikanan Bantu yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas serta target yang harus dicapai oleh penyuluh.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini adalah kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan Pusluh KP dengan *instrument* monitoring dari perjanjian kinerja, manual iku, pelaporan *online* penyuluh perikanan, verifikasi, validasi dan evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan penyuluhan. Didukung juga dengan monitoring setiap SATMINKAL terhadap

penyuluh perikanan dalam melakukan penyusunan profil kelompok maupun pembaharuan data profil kelompok sebagai data dukung kinerjanya yang juga mendukung penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) penyuluh perikanan.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4

Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok)

Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelasnya setelah mendapatkan pendampingan penyuluhan dengan kriteria sesuai Kep Men KP No 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dan atau pedoman lainnya, dimana pengukuhan dilakukan oleh Kepala desa/lurah, camat, bupati/walikota dan atau Kepala Dinas perikanan setempat sesuai dengan kriteria kelompok yang dikukuhkan, dan /atau Jumlah kelompok yang telah mendapat pendampingan dan penilaian kelas, dan dalam proses penetapan.

Indikator kinerja ini diperoleh dari perhitungan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelasnya dan memenuhi kriteria peningkatan kelas (kelas pemula ke madya, kelas madya ke utama) dan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode triwulan yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan. Merupakan indikator kinerja dengan tingkat validitas *outcome* dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan polarisasi *maximize*. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode triwulanan, yang dilaksanakan oleh seluruh SATMINKAL penyuluhan kelautan dan perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa data Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang meningkat, dan data kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang didampingi dan dinilai kelasnya dan dalam proses penetapan, beserta nama penyuluh perikanan Pembina, Dokumen penyampaian data dari Eselon II kepada Kepala BPPSDM KP, Data yang disajikan (dokumen/matrik) di tandatangani Kepala Satker.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target 2.000 (dua ribu) kelompok. Capaian Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok) tersaji pada tabel berikut.

Tabel 13 Capaian IKK 4-Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok)

IKK 4-Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok)											
Realisasi TW III				Tahun 2024					Reviu Renstra Puslatluh KP 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian TW III	% Kenaikan TW III 2023-2024	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024	
7.339	551	803	1.127	2.000	1.005	1.183	117,71	4,96	2.000	59,15	

*Organisasi Baru di Tahun 2024

*Capaian 2020-2023 (Puslatluh)

Pada Triwulan III Tahun 2024 ini, IKK elompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok) telah tercapai sebanyak 1.183 (seribu seratus delapan puluh tiga) kelompok dari target Triwulan III Tahun 2024 sebesar 1.005 (seribu lima) kelompok atau terealisasi 117,71%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024 telah tercapai sebesar 59,15% dari target 2.000 (dua ribu) kelompok. Pusluh KP merupakan organisasi baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Februari 2024, menjadi organisasi di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian realisasi pada Triwulan III pada Tahun sebelumnya.

Namun apabila dibandingkan dengan capaian Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh) sebagai yang mengemban indikator kinerja ini di tahun sebelumnya, indikator kinerja ini mengalami peningkatan sebesar 4,96% dari capaian triwulan III tahun 2023 yang lalu sebesar 1.127 kelompok. Peningkatan ini

dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh percepatan proses penilaian untuk kelompok yang ditingkatkan.

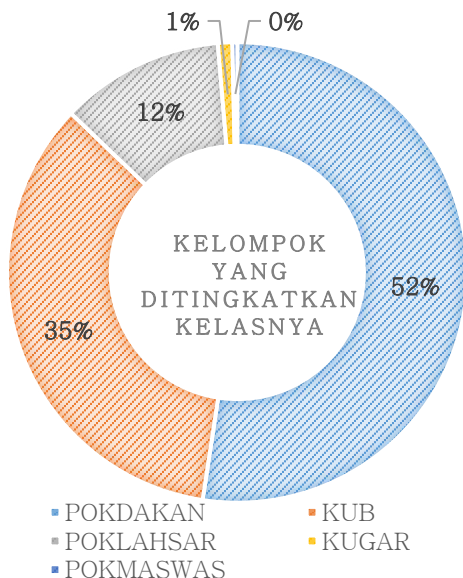
Rincian capaian Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok) sebagai berikut :

Tabel 14 Rincian capaian Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya

No	Saminkal	Target TW III 2024	Capaian TW III 2024	%
1	BBRBLPP Gondol	260	305	117,31
2	BRPBAPPP Maros	120	200	116,67
3	BRPBATPP Bogor	60	70	116,67
4	BRPPUPP Palembang	55	56	101,81
5	BPPP Medan	50	60	120,00
6	BPPP Tegal	150	150	100,00
7	BPPP Banyuwangi	150	170	113,33
8	BPPP Bitung	100	102	110,00
9	BPPP Ambon	60	70	116,67
Total		1005	1183	117,71

Berdasarkan rincian capaian kelompok disuluh per SATMINKAL, diperoleh kontribusi terbanyak dari SATMINKAL BRPBAPPP Maros

dengan 305 (tiga ratus lima) kelompok yang ditingkatkan kelasnya. Apabila dari total rincian capaian kelompok yang ditingkatkan kelasnya dibagi berdasarkan keragaan usahanya terdiri dari Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) berjumlah 620 kelompok, Kelompok Usaha Bersama (KUB) berjumlah 411 kelompok, Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar) berjumlah 136 kelompok, Kelompok Usaha Garam (KUGAR) berjumlah 12 kelompok dan Kelompok



Gambar 9 Persentase Kelompok yang ditingkatkan kelasnya berdasarkan keragaan usahanya

Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sebanyak 4 kelompok yang ditingkatkan kelasnya.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini didukung dari kualifikasi penyuluh perikanan yang kompeten yang memahami potensi kelompok, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan dapat memotivasi kelompok sehingga menumbuhkan antusiasme kelompok untuk meningkatkan kapasitas kelompoknya. Dukungan pemda dan stakeholder terkait dapat dijaga sinerginya oleh penyuluh. Selain itu, kelompok telah mampu melakukan penilaian yang memenuhi kriteria untuk dapat dinaikkan kelasnya sesuai dengan Kepmen KP No.14 Tahun 2012 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini adalah kegiatan penilaian kenaikan kelas kelompok dan penyampaian piagam kenaikan kelas kelompok. Dan dilakukan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan Pusluh KP dengan instrument monitoring dari perjanjian kinerja, manual iku, pelaporan online penyuluh perikanan, verifikasi, validasi dan evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan. Setiap penyuluh perikanan telah melakukan pendampingan kepada kelompok antara lain melakukan penyuluhan serta mengidentifikasi kelompok yang berpotensi naik kelas hingga melakukan penilaian kelas terhadap kelompok binaannya yang juga mendukung penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) penyuluh perikanan. Koordinasi dengan Pemda selalu dijalankan terkait dengan pengembangan kapasitas kelompok dari program-program unggulan BPPSDM.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5

Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (Kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dibentuk setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan, dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku

Utama Perikanan, atau pedoman lainnya. Jumlah kelompok yang telah mendapat pendampingan dan penilaian kelas, dan dalam proses penetapan.

Indikator kinerja ini diperoleh dari perhitungan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dibentuk/ditumbuhkan dan memenuhi kriteria pembentukan kelompok dan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan pembentukan kelompok serta dalam proses pengukuhan diperiode akhir tahun yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan. Merupakan indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan polarisasi *maximize*. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode triwulanan, yang dilaksanakan oleh seluruh SATMINKAL Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa data Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang dibentuk tidak perlu sampai ke pengukuhan kelas kelompok. Dokumen penyampaian data dari Eselon II kepada Kepala BPPSDM KP. Data yang disajikan (dokumen/matrik) di tandatangani Kepala Satker.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target 4.000 (empat ribu) kelompok. Capaian Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (Kelompok) tersaji pada tabel berikut.

Tabel 15 Capaian IKK 5-Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (Kelompok)

IKK 5-Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (Kelompok)											
Realisasi TW III				Tahun 2024					Reviu Renstra Puslatluh KP 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian TW III	% Kenaikan TW III 2023-2024	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024	
3.048	3.053	3.260	3.473	4.000	2.565	2.980	116,18	-14,19	4.000	74,50	

*Organisasi Baru di Tahun 2024

*Capaian 2020-2023 (Puslatluh)

Pada Triwulan III Tahun 2024 ini, IKK Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (Kelompok) telah tercapai sebanyak 2.980 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh) kelompok dari target Triwulan III Tahun 2024 sebesar 2.565 (dua ribu lima ratus enam puluh lima) kelompok atau terealisasi 116,18%.. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024 telah tercapai sebesar 74,50% dari target 4.000 (empat ribu) kelompok. Pusluh KP merupakan organisasi baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Februari 2024, menjadi organisasi di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian realisasi pada triwulan III pada tahun sebelumnya.

Namun apabila dibandingkan dengan capaian Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh) sebagai yang mengemban indikator kinerja ini di tahun sebelumnya, indikator kinerja ini mengalami penurunan sebesar 14,19%. dari capaian triwulan III tahun 2023 yang lalu sebesar 3.473 kelompok. Penurunan capaian ini dipengaruhi oleh data dukung yang disampaikan oleh penyuluh perikanan masih belum sesuai dokumen pendukungnya seperti Berita Acara atau SK pembentukan kelompok dan beberapa penyuluh perikanan baru akan melakukan pembentukan kelompok pada awal triwulan III tahun 2024.

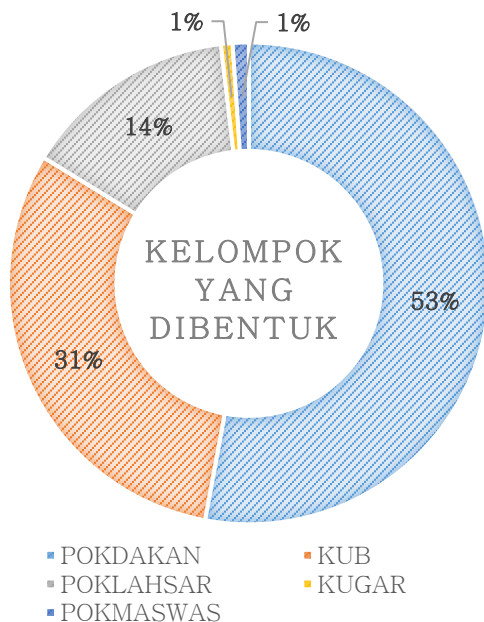
Rincian capaian Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (Kelompok) sebagai berikut :

Tabel 16 Rincian capaian Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk

No	Saminkal	Target TW III 2024	Capaian TW III 2024	%
1	BBRBLPP Gondol	340	350	102,94
2	BRPBAPPP Maros	470	479	101,91
3	BRPBATPP Bogor	210	331	157,67
4	BRPPUPP Palembang	300	400	133,33
5	BPPP Medan	450	511	113,56
6	BPPP Tegal	95	110	115,78
7	BPPP Banyuwangi	400	400	100,00

No	Saminkal	Target TW III 2024	Capaian TW III 2024	%
8	BPPP Bitung	200	224	112,00
9	BPPP Ambon	100	175	175,00
Total		2.565	2.980	116,18

Berdasarkan rincian capaian kelompok disuluh per SATMINKAL, diperoleh kontribusi terbanyak dari SATMINKAL BPPP Banyuwangi dengan 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) kelompok yang dibentuk.



Gambar 10 Persentase Kelompok yang dibentuk berdasarkan keragaan usahanya

Apabila dari total rincian capaian kelompok yang dibentuk dibagi berdasarkan keragaan usahanya terdiri dari Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) berjumlah 1.567 kelompok, Kelompok Usaha Bersama (KUB) berjumlah 913 kelompok, Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar) berjumlah 426 kelompok, Kelompok Usaha Garam (KUGAR) berjumlah 23 kelompok, dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) berjumlah 32 kelompok.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini didukung dari kualifikasi penyuluh perikanan yang kompeten, menguasai ilmu-ilmu baru, inovatif, terampil, solutif, tanggap, paham terhadap potensi setiap kelompok yang akan dibentuk, menguasai mekanisme pembentukan kelompok baru, dan mampu bersinergi dengan lembaga terkait. Selain itu, adanya bantuan pemerintah juga menjadi faktor mendukung tumbuhnya kelompok-kelompok baru binaan penyuluh dari masing-masing SATMINKAL penyuluhan kelautan dan perikanan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini adalah penyampaian Berita Acara Pembentukan Kelompok, Piagam Pengukuhan, dan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok. Dan dilakukan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan Pusluh KP dengan *instrument* monitoring dari perjanjian kinerja, manual iku, pelaporan online penyuluh perikanan, verifikasi dan validasi dan evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan. Penyuluh perikanan telah melakukan pendampingan kepada kelompok antara lain melakukan penyuluhan serta mengidentifikasi wilayah binaannya yang dapat ditumbuhkan menjadi kelompok baru yang juga mendukung penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) penyuluh perikanan.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6

Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, dan penyuluhan. Tenaga kerja yang terlibat langsung/tidak langsung di lingkup BPPSDM diantaranya : Penyuluh Perikanan Bantu, Tenaga kerja yang terlibat pada UMKM, Koperasi Sektor KP, Korporasi Sektor KP yang disuluh, serta tenaga kerja yang terlibat di SFV.

Indikator ini diperoleh dari persentase jumlah tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali tinggi dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan merupakan ikk dengan polarisasi *maximize*. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode tahunan, yang dilaksanakan oleh seluruh SATMINKAL Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa data tenaga kerja yang terlibat langsung/tidak langsung *by name by address* dan aktivitas masing-masing tenaga kerja yang disahkan pimpinan.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target 12.283 (dua belas ribu dua ratus delapan puluh tiga) orang. Pada Triwulan III Tahun 2024 ini, IKK Tenaga Kerja Yang Terlibat Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Orang) belum memiliki target capaian, capaian target tersebut akan diperoleh pada akhir tahun. Pusluh KP merupakan organisasi baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Februari 2024, menjadi organisasi di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Namun dapat disampaikan progress yang dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 ini telah dilakukan pendataan tenaga kerja penyuluh kelautan dan perikanan dan mengumpulkan serta memverifikasi data dukung binaan penyuluh oleh masing-masing SATMINKAL penyuluhan kelautan dan perikanan. Sampai dengan bulan September 2024 ini telah terdata 10.440 tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusluh KP.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 7

Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendapatkan Perizinan Berusaha (Kelompok)

Usaha Mikro, Kecil, merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemertaan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Tujuan dari Izin berusaha adalah : mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan; mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke Lembaga keuangan bank dan non bank; mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau Lembaga lainnya.

Indikator kinerja ini diperoleh perhitungan jumlah pelaku utama/pelaku usaha KP yang yang memenuhi kriteria yang telah dilakukan pendampingan oleh penyuluh yang akan mendapatkan

perizinan dalam berusaha. Merupakan indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan polarisasi *maximize*. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode tahunan, yang dilaksanakan oleh seluruh SATMINKAL Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa data Pelaku usaha yg mendapatkan perizinan.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target 100 (seratus) kelompok. Pada Triwulan III Tahun 2024 ini, IKK Fasilitas Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendapatkan Perizinan Berusaha (Kelompok) belum memiliki target capaian, capaian target tersebut akan diperoleh pada akhir tahun. Pusluh KP merupakan organisasi baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Februari 2024, menjadi organisasi di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Namun dapat disampaikan progress yang dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 ini telah dilakukan pendataan kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan dan mengumpulkan serta memverifikasi data dukung usaha kelautan dan perikanan binaan penyuluh oleh masing-masing SATMINKAL penyuluhan kelautan dan perikanan. Sampai dengan bulan September 2024 ini telah terdata 120 kelompok pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang terfasilitasi mendapatkan perizinan berusaha.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 8

Penyuluh yang Mendampingi Program Lintas Sektor dan Prioritas KKP (Orang)

Lintas Sektor adalah merupakan program yang melibatkan suatu institusi atau instansi negeri atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan dan kekuatan dasar dari pemerintah atau swasta mengenai peraturan yang ditetapkan untuk mewujudkan alternatif

kebijakan secara terpadu dan komprehensif sehingga adanya keputusan dan kerjasama.

Indikator kinerja ini diperoleh dari perhitungan jumlah penyuluh yang mendapatkan penugasan dalam program lintas sector nasional tahun 2024 sesuai dengan peraturan. Merupakan indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode tahunan, yang dilaksanakan oleh seluruh SATMINKAL Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa data Penyuluh yang mendapatkan tugas pendampingan program lintas sektor.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target 2.100 (dua ribu seratus) orang. Pada Triwulan III Tahun 2024 ini, IKK Penyuluh Yang Mendampingi Program Lintas Sektor dan Prioritas KKP (Orang) belum memiliki target capaian, capaian target tersebut akan diperoleh pada akhir tahun. Pusluh KP merupakan organisasi baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Februari 2024, menjadi organisasi di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Dapat disampaikan progres yang dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 ini telah melakukan penunjukan penugasan terhadap kegiatan lintas sektor dan program prioritas KKP. Beberapa penugasan yang mendukung lintas sektor antara lain :

1. Pendamping kegiatan penelitian “Strategi Implementasi Kelembagaan Korporasi Agribisnis Tambak dalam Rangka Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan” kerjasama Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan BRIN dengan lokasi Kabupaten Brebes, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Aceh Tamiang;

2. Pendamping perhutanan sosial melalui *learning management system* (LMS) kerjasama Direktorat Kemitraan Lingkungan, Pusat Diklat SDM LHK, dan P3KP KKP dengan lokasi Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Papua, dan Jawa;
3. Peserta dan/atau pendamping pada pelatihan *Program Capacity Development and Institutional Strengthening in Management of Inland Fisheries* bekerjasama dengan i-Fish FAO dengan lokasi di WPP 432 (Jawa Barat dan Jawa Tengah), WPP 435 (Kalimantan Tengah), dan WPP 438 (Riau, Kep. Riau, Sumatera Selatan).

SASARAN KEGIATAN 2

Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Sasaran kegiatan Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan beberapa indikator yang ditargetkan di Triwulan III Tahun 2024 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 9

Desa/Kawasan Mitra yang Menerapkan Iptek (Desa)

Desa/Kawasan mitra merupakan konsep pembangunan desa perikanan yang berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa yang diwujudkan dalam kegiatan prioritas BPPSDM yaitu Desa Perikanan cerdas/*Smart Fisheries village* (SFV). Sesuai dengan Keputusan Ka BPPSDM, dengan dikembangkannya Desa Perikanan cerdas/*Smart Fisheries village* SFV akan terbentuk desa perikanan unggulan yang produktif yang mampu menerapkan teknologi dan informasi, mandiri dan memperhatikan prinsip berkelanjutan.

Indikator kinerja ini diperoleh dari 3 (tiga) indikator. Masing-masing indikator antara lain 1. Indikator capaian input, 2. Indikator

capaian output, 3. Indikator *outcome*. Indikator capaian Input dilakukan dengan melakukan penilaian calon lokasi sesuai dengan kriteria Desa Perikanan cerdas/*Smart Fisheries village* SMART SFV oleh TAP dan Unit Kerja Pusat. Jumlah desa dikembangkan sesuai dengan kriteria Desa Perikanan cerdas/*Smart Fisheries village* SMART SFV yang dikeluarkan melalui SK Ka BPPSDM. Indikator capaian Output dilakukan dengan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan Tridarma Perguruan Tinggi pada lokasi Desa Perikanan cerdas/*Smart Fisheries village* SMART SFV oleh unit kerja pusat. Sedangkan untuk indikator *outcome* dilakukan dengan penilaian hasil pelaksanaan Desa Perikanan cerdas/*Smart Fisheries village* SMART SFV yang dilaksanakan minimal 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan berdasarkan instrument penilaian. Penghitungan capaian minimal s/d indikator capaian output.

Merupakan indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan polarisasi *maximize*. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode tahunan, yang dilaksanakan oleh seluruh SATMINKAL Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa Indikator Capaian Input : SK Ka BPPSDM terkait penetapan lokasi Desa Perikanan cerdas/*Smart Fisheries village* SFV. Laporan hasil penetapan lokasi sesuai dengan kriteria Desa Perikanan cerdas/*Smart Fisheries village* SFV oleh TAP. Indikator Capaian Output : Laporan pelaksanaan pelatihan dan/atau penyuluhan dan/atau tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan Desa Perikanan cerdas/*Smart Fisheries village* SMART SFV oleh UPT dan disampaikan kepada Kepala Pusatnya. Laporan Capaian Outcome : Laporan hasil penilaian *outcome* Desa Perikanan cerdas/*Smart Fisheries village* SMART SFV oleh Tim Sekretariat BPPSDM.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target 14 (empat belas) desa. Pada Triwulan III Tahun 2024 ini, IKK Desa/Kawasan Mitra yang Menerapkan Iptek (Desa) belum memiliki target capaian, capaian target tersebut akan diperoleh pada akhir tahun. Pusluh KP merupakan organisasi baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan

Perikanan pada tanggal 26 Februari 2024, menjadi organisasi di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Namun dapat disampaikan progress yang dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 ini dilakukan proses identifikasi lokasi dan identifikasi kelompok binaan yang ditetapkan mendukung kegiatan *smart fisheries village* mendukung kampung nelayan maju.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 10

Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan perikanan tepat guna. Pemilihan lokasi percontohan melalui tahap koordinasi dengan pemerintah setempat dan proposal percontohan telah disetujui oleh Pusat pelatihan dan Penyuluhan sebagaimana yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan percontohan dan Pedoman SFV.

Indikator kinerja ini diperoleh dari perhitungan jumlah percontohan penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman percontohan. Merupakan indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan polarisasi *maximize*. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode tahunan, yang dilaksanakan oleh seluruh SATMINKAL Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa Rekap data Pelaksanaan Percontohan di SATMINKAL, Laporan Pelaksanaan Percontohan, Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target 35 (tiga puluh lima) kelompok. Pada Triwulan III Tahun 2024 ini, IKK Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok) belum memiliki target

capaian, capaian target tersebut akan diperoleh pada akhir tahun. Pusluh KP merupakan organisasi baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Februari 2024, menjadi organisasi di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Namun dapat disampaikan progress yang dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 ini dilakukan proses perencanaan penetapan lokasi percontohan kelompok penyuluhan kelautan dan perikanan. Dalam perencanaannya diusulkan 20 lokasi desa dengan beberapa tema perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan, budidaya laut/marikultur, silvofisheries, minapadi, pembenihan udang, budidaya udang vanname, budidaya air tawar, mina eduwisata, budidaya ikan hias dan produk *low carbon feed*, pemuliaan ikan air tawar, rumput laut, inisiasi awal konservasi pulau kecil, pemulihan sumberdaya ikan, mekanisasi perikanan, konservasi dan budidaya pesisir, pendederan ikan patin perkasa, wakatobiais, wisata bahari dan jenis kegiatan SFV UPT maupun SFV Desa selain 5 lokasi KALAMO (Kabupaten Biak Numfor, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Banyuwangi).

SASARAN KEGIATAN 3

Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan

Sasaran kegiatan Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut yang ditargetkan di Triwulan III Tahun 2024 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 11

Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang Disusun (NSPK)

Merupakan jumlah NSPK yang disiapkan terkait penyelenggaraan Penyuluhan pada Tahun 2024. NSPK disusun dengan melibatkan Stakeholder dan Bagian Hukum Sekretariat BPPSDM dan atau Biro Hukum sesuai dengan tingkat kewenangan NSPK yang dibuat.

Indikator kinerja ini diperoleh dari perhitungan jumlah NSPK yang disiapkan terkait penyelenggaraan Penyuluhan KP. Merupakan indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali tinggi dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan polarisasi *maximize*. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode triwulanan, yang dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa NSPK yang telah disahkan oleh Kepala Pusat/ Kepala BPPSDM KP, dan atau Surat usulan NSPK ke Sekretariat BPPSDM KP untuk diproses lanjut ke Biro Hukum KKP. Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target 4 (empat) NSPK. Pada Triwulan III Tahun 2024 ini, IKK Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang Disusun (NSPK) belum memiliki target capaian, capaian target tersebut akan diperoleh pada akhir tahun. Pusluh KP merupakan organisasi baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Februari 2024, menjadi organisasi di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Namun dapat disampaikan progress yang dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 ini dilakukan proses harmonisasi dengan biro hukum berupa usulan 4 memo draft permen 14, prosun penyuluhan, naskah urgensi pembuatan UPT, dan SK programa penyuluhan.

SASARAN KEGIATAN 4

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Sasaran kegiatan Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker terdiri dari 10 (sepuluh) indikator kinerja. Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan beberapa indikator yang ditargetkan di Triwulan III Tahun 2024 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 12

Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)

Dasar Hukum PerMenKP 65/2016 tentang pedoman KS dan penyusunan perjanjian di lingkungan KKP. Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama Penyuluhan kelautan dan perikanan. Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/ organisasi lainnya yang memiliki kesamaan profesi/kepakaran yang diikuti oleh Satker/ UPT. Kemitraan adalah hubungan dengan badan/ perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama. Ruang lingkup meliputi 1. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan, 2. Diseminasi dan publikasi, 3. Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama, 4. Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh BPPSDM.

Indikator ini diperoleh dari jumlah jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja lingkup Pusluh KP yang di koordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Sekretariat BPPSDM, ditandatangani oleh Pejabat berwenang, dan diregistrasi oleh Sekretariat (penomoran 1 pintu oleh Sekretariat). Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja lingkup BPPSDM yang di dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Sekretariat BPPSDM pada tahun yang masih berjalan sampai dengan tahun 2024. Jumlah jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja lingkup BPPSDM yang di dikoordinasikan dan/atau difasilitasi

oleh Sekretariat BPPSDM yang terbentuk diluar PEMDA sesuai PP Nomor 28/2018 tentang Kerjasama Daerah.

Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan polarisasi *maximize*. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode tahunan, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa dokumen kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang (KB/IA, PKS/MoU, KAK yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, SK/dokumen lainnya yang sejenis. TOR/RAB Rencana Kerja Kerjasama masing-masing Pihak Tahun 2022 Rencana Kerja Bersama dengan Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh para pihak. Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target 13 (tiga belas) dokumen. Pada Triwulan III Tahun 2024 ini, IKK Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Dokumen) belum memiliki target capaian, capaian target tersebut akan diperoleh pada akhir tahun. Pusluh KP merupakan organisasi baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Februari 2024, menjadi organisasi di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Namun dapat disampaikan progres yang dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 ini dilakukan proses finalisasi jejaring maupun kerjasama yang akan dilaksanakan pada setiap satuan kerja di bawah Pusat Penyuluhan KP.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 13

Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum,,

layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan, layanan data dan informasi, layanan money (termasuk pelaporan), pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran.

Persentase dokumen dukungan hasil layanan yang tersedia dibandingkan total dokumen hasil layanan. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali tinggi dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan polarisasi *maximize*. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode triwulanan, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan namun sebagai sumber data yang digunakan sampai dengan Level 2. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker dapat berupa laporan, matrik, *screen shoot* aplikasi yang ditandatangani pimpinan satker. Dokumen Layanan Manajemen di Pusat Penyuluhan KP.

Pada Tahun 2024 ini Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan memiliki target 100% (seratus persen) layanan dukungan manajemen internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Berikut merupakan capaian Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan :

Tabel 17 Capaian IKK 13- Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)

IKK 13- Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)										
Realisasi TW III				Tahun 2024					Reviu Renstra Pusluh KP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian TW III	% Kenaikan TW III 2023-2024	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
-	-	-	-	100	100	100	100,00	-	100	100,00

*Organisasi Baru di Tahun 2024

Pada Triwulan III Tahun 2024, target IKK Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan

Perikanan ini ditetapkan 100,00% dan dilakukan pengukuran secara Triwulan dengan target Tahunannya juga sebesar 100,00%. Nilai capaian IKK ini mencapai 100,00% atau 100,00% dari target 100,00%. Dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2024 juga merupakan target yang stabil di angka 100,00% setiap Tahunnya. Pusluh KP merupakan organisasi baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Februari 2024, menjadi organisasi di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian realisasi pada Triwulan III pada Tahun sebelumnya. Adapun rincian dokumen yang telah dihasilkan antara lain :

Tabel 18 Rincian Dokumen Manajemen Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

No	Judul	Target		Realisasi	%
		Tahunan	TW III	TW III	
1	Perjanjian Kinerja	1	1	1	100%
2	Manual IKU	1	1	1	100%
3	Rincian Kerja Tahunan	1	1	1	100%
4	Rincian Target Indikator Kinerja	1	1	1	100%
5	Rencana Aksi	1	1	1	100%
6	Rincian Kertas Kerja (RKAKL)	1	1	1	100%
7	Matriks Cascading	1	1	1	100%
8	Laporan Bulanan	9	6	6	100%
9	Laporan Triwulanan	3	2	2	100%
10	Laporan Semesteran	2	1	1	100%
11	Evaluasi Rencana Aksi	3	2	2	100%
12	Laporan Aplikasi Emonev Bappenas	9	6	6	100%
Total		33	24	24	100%

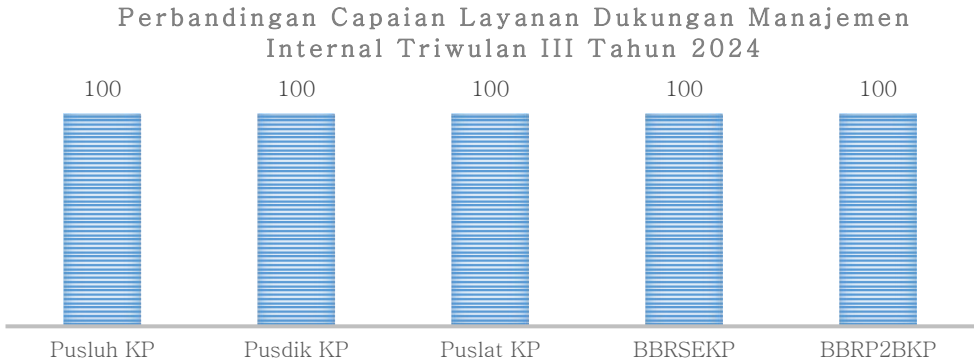
Pada dukungan dokumen perencanaan diperoleh dari dokumen awal organisasi baru Pusluh KP, sedangkan untuk dukungan dokumen pelaporan diperoleh dari progres terkini dan progres kegiatan yang

melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada pada Puslatluh KP pada periode sebelum perubahan organisasi.

Jika dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lain seperti Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP), Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP), Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP), dan Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP) capaian dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya memiliki capaian yang sama di setiap unit Eselon II lainnya. Perbandingan capaian dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 19 Perbandingan IKK Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%) dengan Eselon II Lainnya

	Pusluh KP	Pusdik KP	Puslat KP	BBRSEKP	BBRP2BKP
Target	100	100	100	100	100
Realisasi	100	100	100	100	100
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Gambar 11 Perbandingan Capaian Layanan Dukungan Manajemen Internal Triwulan III Tahun 2024 dengan Eselon II Lainnya

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah dengan komitmen pimpinan dan masing-masing ketua tim kerja dalam pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan dan juga untuk pelaksanaan program kegiatan masing-masing tim kerja.

Kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain dilakukan penyusunan dokumen perencanaan hingga pelaporan kinerja

dari masing-masing penanggung jawab maupun tim kerja yang mendukung program dan kegiatan Pusluh KP. Selain itu, dengan koordinasi yang baik setiap kegiatan manajerial dapat di laksanakan dengan baik dan tepat waktu.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 14

Persentase Unit Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Sistem Manajemen Pengetahuan terstandar yang diimplementasikan di Level Pusat Lingkup BPPSDM Tahun 2024 diantaranya. Menggunakan Aplikasi (*collaboration office*) dengan alamat *portal.kkp.go.id*. Pengukuran level 2 dihitung dengan lingkup Level Pusat Lingkup BPPSDM (Sekretaris/Kepala Pusat/Balai & Ketua Tim Kerja). Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap satu triwulan dengan nilai 3 poin. Bobot Komponen Keaktifan diantaranya Konten dokumentasi tulisan kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5; Konten berupa karya infografis poin 1; Konten berupa jurnal/video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3.

Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan merupakan ikk dengan serta dengan polarisasi *maximize*. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode triwulanan, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusluh KP dan sebagai sumber datanya oleh Sekretariat BPPSDM dan/atau PUSDATIN. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa Capaian Nilai MP setiap Triwulan dan/atau Surat, penyampaian hasil capaian IKU MP : Capaian Nilai MP lingkup Level 2 BRSDM setiap Triwulan dari Sekretraiat BPPSDM KP.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target 94% (sembilan puluh empat persen) unit kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang menerapkan sistem pengetahuan terstandar. Capaian IKK Persentase Unit Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar tersaji pada tabel berikut.

Tabel 20 Capaian IKK 14–Persentase Unit Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

IKK 14–Persentase Unit Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)										
Realisasi TW III				Tahun 2024					Renstra Pusluh KP 2020–2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian TW III	% Kenaikan TW III 2023–2024	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
–	–	–	–	94	94	118,98	120,00	–	94	120,00

*Organisasi Baru di Tahun 2024

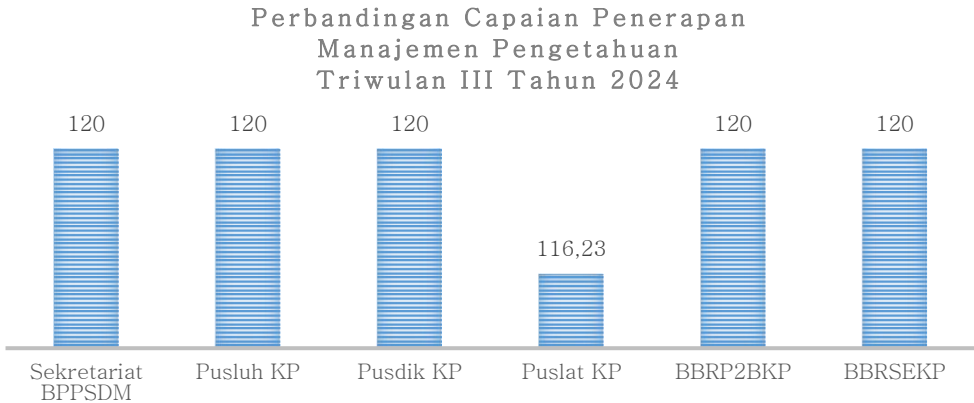
Pada Triwulan III Tahun 2024 ini, IKK Persentase Unit Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar telah tercapai sebesar 118,98% dari target Triwulan III Tahun 2024 sebesar 94% atau terealisasi 126,57%, karena pada aplikasi kinerjaku nilai toleransi maksimal 120,00% maka persentase capaiannya adalah 120,00%. Pusluh KP merupakan organisasi baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Februari 2024, menjadi organisasi di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian realisasi pada Triwulan III pada Tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2024 dengan target 90, maka capaian Triwulan III Tahun 2024 telah melampaui capaian hingga 120,00%.

Sesuai dengan Surat Nomor B.7516/BPPSDM.1/TU.210/X/2024 a.n. Kepala BPPSDM, Sekretaris BPPSDM perihal Capaian Nilai IKU

MP Terstandar Lingkup KKP Triwulan III 2024 tanggal 11 Oktober 2024. Sebagaimana IKK ini diterapkan diseluruh unit eselon II maka capaian kinerja Pusluh KP dalam penerapan manajemen pengetahuan Triwulan III Tahun 2024 dapat dibandingkan dengan unit Eselon II lainnya. Jika dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lain lingkup BPPSDM KP, Pusluh KP memperoleh nilai terbaik ke tiga dari enam unit Eselon II di BPPSDM KP lainnya. Capaian penerapan Manajemen Pengetahuan unit Eselon II lingkup BPPSDM KP Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 21 Perbandingan IKK Persentase Unit Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) dengan Eselon II Lainnya

	Sekretariat BPPSDM	Pusluh KP	PusdikKP	PuslatKP	BBRP2BKP	BBRSEKP
Target	94	94	94	94	94	94
Realisasi	113,15	118,98	114,58	109,26	133,33	133,33
%	120,00	120,00	120,00	116,23	120,00	120,00



Gambar 12 Perbandingan Capaian Penerapan Manajemen Pengetahuan unit Eselon II lingkup BPPSDM KP Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III Tahun 2024, faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini disebabkan oleh tersedianya aplikasi *platform Portal Collaboration Office* (portal.kkp.go.id) yang mudah diakses. Selain itu ditambah komitmen dan keaktifan pimpinan dan setiap ketua tim kerja dalam menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar ini.

Kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain terlaksananya kegiatan-kegiatan positif yang dapat dibagikan di aplikasi *platform Portal Collaboration Office* (portal.kkp.go.id). Dilakukan pula monitoring dan evaluasi setiap bulan keaktifannya agar lebih efektif lagi dalam menggunakan aplikasi tersebut.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 15

Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap Tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Indikator ini diperoleh dari nilai yang diukur setiap Tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali tinggi dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan merupakan ikk dengan polarisasi *maximize*. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode semesteran, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa surat hasil pengukuran IP ASN dari BPPSDM KP dan nilainya dapat diakses melalui <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2023>.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target 81 (delapan puluh satu) indeks profesional ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan III Tahun 2024 ini, IKK Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

(Indeks) tidak memiliki target karena merupakan IK yang ditargetkan semesteran. Pusluh KP merupakan organisasi baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Februari 2024, menjadi organisasi di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian realisasi pada Triwulan III pada Tahun sebelumnya.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 16

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas LK Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)

Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I Tahun 2023.

Indikator ini diperoleh dari persentase jumlah nilai temuan BPK pada Laporan Keuangan (LK) unit Eselon II Tahun 2023 terhadap jumlah realisasi anggaran unit Eselon II Tahun 2023. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan merupakan ikk dengan polarisasi *minimize*. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode tahunan, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa Surat Penyampaian Nilai LHP BPK dari BPPSDM KP.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target $\leq 0,5\%$ (kurang dari sama dengan nol koma lima persen). Pada Triwulan III Tahun 2024 ini, IKK Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan belum memiliki target capaian, capaian target tersebut akan diperoleh pada akhir Tahun. Pusluh KP merupakan organisasi baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Februari 2024, menjadi organisasi di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Namun dapat disampaikan masih dilakukan penggunaan anggaran sesuai aturan berlaku dan memantau proses administrasi keuangan.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 17

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)

Rekomendasi hasil pengawasan diperoleh dari persentase jumlah rekomendasi yang telah tuntas ditindaklanjuti berdasarkan total rekomendasi yang diperoleh. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode Triwulanan, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa urut penyampaian hasil Rekomendasi Pengawasan dari Sekretariat BPPSDM KP.

Pada Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 ditetapkan target 82% (delapan puluh dua persen) rekomendasi hasil pengawasan yang telah dilengkapi dan disampaikan. Capaian IKK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 22 Capaian IKK 17- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)

IKK 17-Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)										
Realisasi TW III				Tahun 2024					Renstra Pusluh KP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian TW III	% Kenaikan TW III 2023-2024	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
-	-	-	-	82	82	82	100,00	-	82	100,00

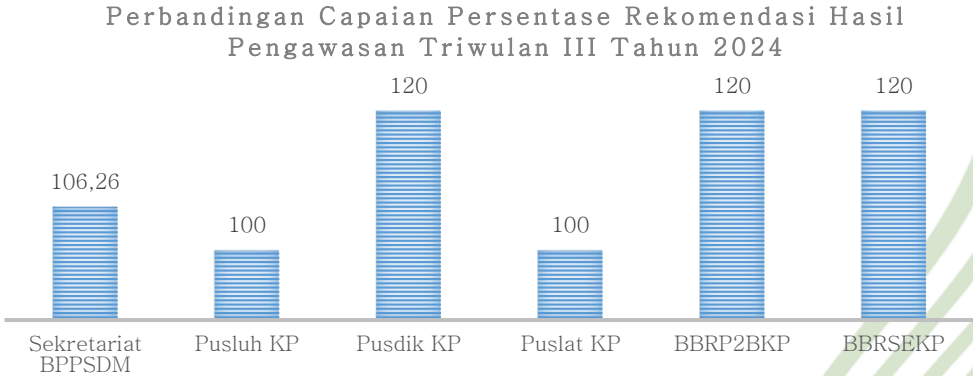
*Organisasi Baru di Tahun 2024

Pada Triwulan III Tahun 2024, target IKK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan ini ditetapkan sebesar 82%. Mengacu kepada Surat a.n. Kepala BPPSDM, Sekretaris BPPSDM Nomor : B.7568/BPPSDM.1/HP.510/X/2024 tentang Capaian IKU “Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP dan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasi Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja Lingkup KKP, tanggal 14 Oktober 2024. Hasil pengukuran sampai dengan Triwulan III, Pusluh KP tidak terdapat temuan atau 0, sehingga capaian IKUnya disesuaikan target yaitu 82% atau 100,00%. Dalam rencana jangka menengah 2020-2024, target IKK ini ditetapkan sebesar 82, jika dibandingkan dengan realisasi triwulan III tahun 2024 ini telah tercapai sebesar 100,00%. Pusluh KP merupakan organisasi baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Februari 2024, menjadi organisasi di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian realisasi pada Triwulan III pada Tahun sebelumnya.

Capaian IKK diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 31 Desember 2023 (Triwulan IV Tahun 2023) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Maret Tahun 2024 (Triwulan I Tahun 2024). Sebagaimana IKK ini diterapkan diseluruh unit eselon II maka capaian kinerja Pusluh KP dalam persentase rekomendasi hasil pengawasan Tahun 2024 dapat dibandingkan dengan unit Eselon II lainnya. Jika dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lain lingkup BPPSDM KP, Pusluh KP dan Puslat KP memiliki nilai yang sama 82% dengan persentase capaian yang sama sebesar 100,00% karena tidak memiliki temuan. Selain itu terdapat 3 (tiga) eselon II yang sudah menindak lanjuti temuan yaitu PusdikKP, BBRSEKP, dan BBRP2BKP. Sedangkan Sekretariat BPPSDM memiliki temuan yang belum ditindaklanjuti sehingga mendapatkan 93,22% Capaian penerapan Manajemen Pengetahuan unit Eselon II lingkup BRSDM KP Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 23 Perbandingan IKK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%) dengan Eselon II Lainnya

	Sekretariat BPPSDM	Pusluh KP	PusdikKP	Puslat KP	BBRP2BKP	BBRSEKP
Target	82	82	82	82	82	82
Realisasi	87,14	82	100	82	100	100
%	106,26	100,00	120,00	100,00	120,00	120,00



Gambar 13 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)

Faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah antisipasi kendala dan masalah dalam administrasi keuangan. Komitmen pimpinan bersama tim keuangan maupun perbendaharaan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam proses administrasi keuangan.

Kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja ini dipengaruhi oleh koordinasi antar penanggung jawab dengan pimpinan sehingga terlaksana administrasi keuangan dan perbendaharaan yang baik. Selain itu, dilakukan monitoring internal secara rutin dalam setiap pelaksanaan pengadministrasian keuangan dalam ketersediaan dokumen keuangan pada setiap bulan.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 18

Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)

Nilai PM SAKIP Level II BPPSDM dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Nilai PM SAKIP Unit Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon II lingkup BPPSDM.

Nilai PM SAKIP Level II lingkup BPPSDM adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim SAKIP BPPSDM. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan merupakan ikk dengan polarisasi *maximize*. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode tahunan, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa Hasil Penilaian Mandiri Satker dan hasil verifikasi Tim BPPSDM.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target 81 (delapan puluh satu) nilai mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan

Perikanan. Pada Triwulan III Tahun 2024 ini, IKK Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai) belum memiliki target capaian, capaian target tersebut akan diperoleh pada akhir tahun atau setelah dilakukan penilaian mandiri SAKIP. Pusluh KP merupakan organisasi baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Februari 2024, menjadi organisasi di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Namun dapat disampaikan progres yang telah dilakukan antara lain telah dilakukan perhitungan mandiri SAKIP bersama tim Sekretariat BPPSDM KP menggunakan aplikasi DSMS dan juga telah melakukan penginputan pada aplikasi Kinerjaku. Penilaian SAKIP masih dilakukan menggunakan organisasi yang lama, sehingga nilai Pusluh KP masih menunggu konfirmasi kembali nilai yang akan digunakan.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 19

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)

Rekonsiliasi kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan adalah Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon II Setjen untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik.

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. Nilai Rekonsiliasi Kinerja berdasarkan Nilai Aspek Kepatuhan, Nilai Aspek Kesesuaian, Nilai Aspek Ketercapaian, Nilai Aspek Ketepatan. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan merupakan ikk dengan polarisasi

maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode tahunan, yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja lingkup Pusluh KP sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa surat Penyampaian Nilai Rekonsiliasi dari Sekretariat BPPSDM KP.

Pada Tahun 2024 ini Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan memiliki target nilai rekonsiliasi kinerja sebesar 94 (sembilan puluh empat). Pada Triwulan III Tahun 2024 ini, IKK Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai) belum memiliki target capaian, capaian target tersebut akan diperoleh pada akhir tahun. Pusluh KP merupakan organisasi baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Februari 2024, menjadi organisasi di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Namun dapat disampaikan progress yang telah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2024 antara lain mempersiapkan dokumen pendukung rekonsiliasi kinerja terdiri dari dokumen perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 20

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran diperoleh dari konversi nilai indikator dan bobot indikatornya, terdapat 8 (delapan) indikator antara lain revisi DIPA, deviasi RDP, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, dan capaian output. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi

akhir dan polarisasi *maximize*. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode semesteran, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa Surat penyampaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adri Sekretariat BPPSDM KP.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan dengan target nilai 93,76 (sembilan puluh tiga koma tujuh enam). Capaian IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan akan tersedia diakhir tahun karena merupakan indikator kinerja yang menggunakan periode semesteran.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 21

Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan pemerintah

Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan polarisasi *maximize*. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode tahunan, yang

dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa Surat penyampaian Nilai Kinerja Anggaran dari Sekretariat BPPSDM KP.

Pada Tahun 2024 ini Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan memiliki target 82 (delapan puluh dua) nilai kinerja anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan III Tahun 2024 ini, IKK Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai) belum memiliki target capaian, capaian target tersebut akan diperoleh pada Tahunan. Pusluh KP merupakan organisasi baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Februari 2024, menjadi organisasi di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Namun demikian, dapat disampaikan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 ini sudah dilakukan penginputan data capaian output pada aplikasi SAKTI modul komitmen sebagai bahan capaian yang akan terintegrasi dengan aplikasi Smart DJA.

Akuntabilitas Keuangan Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III Tahun 2024 Program dan Kegiatan lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya anggaran sebesar Rp.303.574.162.452 atau 67,71% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.448.345.506.000. Realisasi anggaran tersebut dilaksanakan oleh unit kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Penyerapan anggaran berdasarkan Satuan Kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan berdasarkan aplikasi Omspan per tanggal 30 September 2024.

Dalam pelaksanaan anggaran, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu buka blokir anggaran pada kegiatan dukungan manajemen namun tidak mempengaruhi kinerja pelaksanaan

anggaran selama Triwulan III Tahun 2024. Selain itu, masih menunggu proses revisi anggaran penambahan anggaran teknis penyulhan kelautan dan perikanan. Secara umum kinerja Pusluh KP Triwulan III Tahun 2024 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasilkan tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti penyesuaian rencana penarikan dana dan rencana operasional kegiatan setelah adanya kebijakan buka blokir dan revisi anggaran. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian rencana penarikan dana dan rencana operasional sejak awal tahun apabila ada kegiatan yang di blokir.

Tabel 24 Rincian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Utama dan Pendukung IK Triwulan III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN	TARGET TW III	CAPAIAN TW III	%	RO PENDUKUNG	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%
1 Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Rupiah Milyar)	2,293	1,092	1,545	120,00	Layanan Pengelolaan PNBPN	143.767.000	73.424.548	51,07
2 Penyuluhan Perikanan PNS yang Bersertifikat Kompetensi (%)	50	-	-	-	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	2.551.584.286	1.438.841.140	56,39
3 Kelompok Pelaku utama / Pelaku Usaha yang Disuluh (Kelompok)	47.500	20.452	22.482	109,93	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	18.139.375.286	12.077.692.434	66,58
4 Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok)	2.000	188	214	113,83	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	16.307.889.286	9.572.919.188	58,70
5 Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (Kelompok)	4.000	1.130	1.611	120,00	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	13.083.649.286	7.255.263.785	55,45
6 Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Orang)	12.283	-	-	-	Dukungan Program Prioritas Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	12.917.839.286	7.224.785.951	55,93
7 Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendapatkan Perizinan Berusaha (Kelompok)	100	-	-	-	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	9.675.514.286	4.814.479.377	49,76

8	Penyuluh yang Mendampingi Program Lintas Sektor dan Prioritas KKP (Orang)	2.100	-	-	-	Belum dianggarkan secara khusus	100.000.000	-	0,00
9	Desa/Kawasan Mitra yang Menerapkan Iptek (Desa)	14	-	-	-	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendaapatkan Percontohan Penyuluhan	7.115.000.000	1.885.665.306	26,50
10	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	35	-	-	-	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan	17.491.225.000	2.749.271.980	15,72
11	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang Disusun (NSPK)	4	-	-	-	Belum dianggarkan secara khusus	100.000.000	13.990.500	13,99
12	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	13	-	-	-	Pelayanan KerjasamaPelayanan Kerjasama Riset Perikanan	1.145.456.284	572.319.568	49,96

13	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	100	100,00	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Operasional Unit Rintisan dan Instalasi Pelayanan Publik Pelayanan Kehumasan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Kesekretariatan Pimpinan Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran Pemeliharaan Kantor Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan	314.852.174.00 0	234.548.792.92 8	74,49
14	Persentase unit kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94	94	111,8	118,94	Pelayanan Data Riset Perikanan Layanan Data Layanan Pengelolaan Jurnal	285.785.000	200.961.166	70,32
15	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)	81	78	86,19	110,50	Pengelolaan PUG Pelayanan Manajemen SDM	373.442.000	181.845.044	48,69
16	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	≤ 0,5	-	-	-	Tindaklanjut Hasil Rekomendasi / SPIP Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK dan Pengawasan Inspektorat Jenderal	504.975.000	212.951.140	42,17

17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	82	82	82	100,00	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) /Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)/Manajemen Risiko (MR)	160.228.000	101.794.816	63,53
18	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	81	-	-	-	Penilaian SAKIP Riset Perikanan Perencanaan Program dan Anggaran Penyusunan Rencana dan Program Riset	455.989.000	160.803.253	35,26
19	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	94	-	-	-	Pelayanan Pelaporan Kinerja Rekonsiliasi Kinerja Penyusunan Laporan dan Bahan Refleksi Outlook	400.525.000	79.199.987	19,77
20	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	93,76	83	90,87	105,05	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Riset dan SDM KP Layanan Pengelolaan PBJ Gaji dan Tunjangan Riset Perikanan dan Riset Kelautan Langganan Daya dan Jasa Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor Pusrisikan Peralatan Fasilitas Perkantoran Riset Perikanan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pelayanan Keuangan dan Perbendaharaan	22.968.242.000	14.305.079.601	62,28

21	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	82	-	-	-	Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Monev dan Capaian Kinerja Penyusunan dan Revisi Anggaran	9.572.846.000	6.104.080.742	63,76
----	--	----	---	---	---	---	---------------	---------------	-------

Efisiensi Anggaran dan Sumber Daya

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) merupakan satuan kerja di bawah Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat perencana untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian untuk mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Efisiensi Anggaran

Hasil perhitungan efisiensi anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan adalah hasil pengukuran yang akan didapatkan pada akhir tahun. Hasil perhitungan efisiensi anggaran Pusluh KP sebagaimana biasanya melalui aplikasi Smart DJA, sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 ini belum dapat ditampilkan karena masih dalam penginputan capaian di aplikasi SAKTI. Pembaharuan data nilai kinerja baru sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Penilaian efisiensi anggaran akan disampaikan pada laporan kinerja tahunan.

Nilai SMART tersebut pada dasarnya merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, memiliki Nilai Efisiensi yang berasal dari variable efisiensi yang mencapai. Nilai efisiensi didapatkan dari membandingkan antara capaian keluaran (output) program, data realisasi anggaran dan data pagu anggaran, sedangkan efisiensi diukur dengan membandingkan

dengan dua indikator variabel penilaian, yaitu realisasi anggaran dan capaian output. Angka Efisiensi dipengaruhi oleh capaian output DIPA Ancol (Pusluh KP) dengan nilai CRO (Capaian Rincian Output). Adapun, efisiensi yang menunjukkan ini adalah tidak menjadi variable yang *independen* (bebas), namun merupakan variable yang terikat, yaitu terikat dengan nilai realisasi anggaran dan nilai capaian keluaran (output) sehingga nilainya sangat menentukan dalam menggambarkan progress nilai kinerja anggaran yang sangat penting menjadi perhatian dalam monitoring dan evaluasi suatu organisasi. Nilai akhir Kinerja Anggaran dalam Smart DJA sangat dipengaruhi oleh nilai efisiensi yang dimaksud, tingginya nilai kinerja efisiensi berimplikasi pada tingginya Nilai Akhir Kinerja Anggaran. Sementara itu, jika nilai efisiensi rendah, maka akan berkontribusi pada rendahnya Nilai Kinerja Anggaran.

Terdapat 4 (empat) alur tahapan untuk mencapai efisiensi anggaran dan sumber daya pada Pusluh KP yaitu; perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta penyesuaian. Efisiensi tersebut merupakan hasil evaluasi anggaran dan sumber daya yang akan didapatkan setelah melalui reuiu anggaran maupun kinerja. Sampai denagn Triwulan III Tahun 2024 Pusluh KP telah melakukan revisi anggaran sebanyak 4 (empat) kali, berikut rinciannya.

Tabel 25 Kronologi Revisi Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

No.	DIPA	Tanggal Pengesahan	Pagu Anggaran	Pengesahan Revisi	Keterangan Revisi
1	Awal	24 November 2023	35.338.034.000		
2	Revisi DIPA-1 Blokir AA (Revisi DJA)	29 Januari 2024	35.338.034.000	S-84/AG/AG.3/2024 tanggal 29 Januari 2024	Blokir AA (Dukman 2.450.000.0000)
3	Revisi DIPA-2	19 Februari 2024	35.338.034.000	193/KPA/BRSDM /II/2024 tanggal 16 Februari 2024	Revisi POK dan Revisi Lembar 3 DIPA triwulan I

No.	DIPA	Tanggal Pengesahan	Pagu Anggaran	Pengesahan Revisi	Keterangan Revisi
4	Revisi DIPA-3	7 Juni 2024	34.307.788.000	S-213/PB.2/2024 tanggal 7 Juni 2024	Pergeseran anggaran operasional dan pemeliharaan kantor antar satker, dan pergeseran anggaran non-operasional pada kegiatan Dukungan Manajemen (2378) antar satker

Efisiensi Sumber Daya

Jumlah sumber daya manusia Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) dengan perubahan organisasi dan mutasi pegawai memiliki jumlah pegawai ASN 52 dan PPNPN, diantaranya pegawai tersebut mayoritas tingkat pendidikan S1 dan diikuti oleh Pendidikan S2 dan SMA. Selain itu, Pusluh KP memiliki pegawai dengan jabatan fungsional perencana yang cukup banyak diantara jabatan fungsional lainnya. Dengan demikian pengelolaan program dan kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan dapat berjalan secara optimal dengan SDM yang ada sehingga target kinerja dapat tercapai.



PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Sesuai dengan visi dan misi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di atas, pada Tahun 2024 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pada kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi dengan 4 (empat) Sasaran Kinerja (SK) yang ingin dicapai dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Kegiatan. Untuk setiap Sasaran Kinerja (SK) yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Berdasarkan aplikasi kinerjaku, capaian sasaran strategis Pusluh KP dengan toleransi 0% menunjukkan Status Sasaran Strategis Indikatornya berwarna Biru atau Istimewa. Hal ini karena Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Triwulan III Tahun 2024 ini seluruh capaian telah tercapai dengan capaian 111,21%. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Sasaran Kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024, seluruhnya dapat tercapai sebagai berikut :

1. IKK 1–Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan tercapai sebanyak Rp. 2,63 Milyar atau 120,00% dari target Rp. 1,10 Milyar;
2. IKK 3–Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha yang Disuluh tercapai sebanyak 38.060 kelompok atau 110,00% dari target 34.600 kelompok;
3. IKK 4–Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya tercapai sebanyak 1.183 kelompok atau 117,71% dari target 1.005 kelompok;

4. IKK 5–Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk tercapai sebanyak 2.980 kelompok atau 116,18% dari target 2.565 kelompok;
5. IKK 13–Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%) tercapai sebesar 100,00% atau 100,00% dari target 100,00%;
6. IKK 14–Persentase Unit Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar tercapai sebesar 118,98% atau 120,00% dari target 94%;
7. IKK 17–Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan tercapai sebesar 82% atau 100,00% dari target 82%;

Dari sisi kinerja keuangan, dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran Pusluh KP Triwulan III Tahun 2024 cukup baik yaitu mencapai Rp.303.574.162.452 atau 67,71% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.448.345.506.000.

Permasalahan dan Tindaklanjut

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dicapai dengan baik, yang persentase pencapaiannya digambarkan mengalami kenaikan pada perkembangan fisik kegiatan dari masing-masing Sasaran Kegiatan di setiap periode waktu baik bulanan maupun triwulanan. Dalam proses pencapaian kinerja, sampai dengan Triwulan III secara keseluruhan tercapai dengan baik walaupun ada beberapa kendala dalam teknis penganggaran untuk kegiatan teknis sebagai konsekuensi terjadinya perubahan organisasi. Kendala tersebut telah tertangani dengan adanya persiapan Perjanjian Kinerja, IKK dan target targetnya yang sampai saat ini masih dalam proses penyelarasan anggaran agar pada triwulan selanjutnya terkendali dengan baik sehingga tidak ada permasalahan yang berarti.

Dengan rencana aksi dan tindakan nyata yang akan dilakukan selanjutnya, kata kunci : komunikasi, konsolidasi dan koordinasi cepat dipastikan akan menghasilkan percepatan, kecepatan, efektifitas, keselarasan, dan konsistensinitas yang baik sehingga seluruh kegiatan baik menejerial maupun substantif akan optimal terhadap pemanfaatan/penggunaan/penarikan dana yang harus sesuai target dengan hasil kegiatan yang berkualitas.

Penutup

Selaras dengan capaian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP, Pencapaian Kinerja Pusluh KP terhadap Target Sasaran Kinerjanya tercapai pada Triwulan III Tahun 2024, dengan telah melakukan penyelesaian kendala agar terkendali. Namun demikian, rekomendasi yang disampaikan tetap menjadi prioritas kebijakan yang segera harus di atas dan ditindaklanjuti pada triwulan III berjalan ini agar pada akhir tahun 2024 seluruhnya kinerja terselesaikan dengan baik dan terakomodir di LKj secara komprehensif.

Kinerja pada dasarnya adalah Komitmen, Konsistensi dan Konsekuensi dalam merencanakan, melaksanakan, mencapai dan menghasilkan output yang berkualitas, yang akan berdampak pada kualitas hasil yang diharapkan. Untuk mencapainya, akan selalu diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak dalam melaksanakan komitmen yang telah ditetapkan. Komitmen harus direncanakan dengan cermat, intuitif, solusif, konstruktif dan inovatif untuk mengemban amanah (visi, misi, tujuan dan sasaan) penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Hasil kinerja yang tercapai tentu tidak hanya menjadi laporan yang selanjutnya akan didokumentasikan dan kemudian diarsipkan, namun harus menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan kedepan, dan dapat memberikan dampak dalam aplikasi nyata kebijakan pembangunan KP serta pemenuhan Komitmen dalam RPJM RI 2021-2024, Visi KKP, Misi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP dan Renstra Pusluh KP 2021-2024.

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan harus dilakukan lebih cermat dan matang, dengan mempertimbangkan sasaran dan tujuan organisasi secara tepat sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dan faktor yang mempengaruhi manajemen perubahan yang terjadi. Strategi dan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan wawasan untuk mengetahui perkembangan issue dan permasalahan terkini harus selalu diupayakan dalam memulai langkah di Tahun mendatang.

Akhirnya, Laporan Kinerja (LKj) Pusluh KP Triwulan III Tahun 2024 diharapkan menjadi “cermin” sekaligus pertanggung jawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan langkah dan tindakan kedepan dalam perencanaan. Dengan demikian harapan bahwa terbentuknya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) akan terwujud. Selain itu, LKj ini dapat juga menjadi salah satu kontribusi dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di Tahun mendatang.



LAMPIRAN



LAMPIRAN

Lampiran Perjanjian Kinerja Pusluh KP 2024 awal (2 April 2024)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAN www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hendra Yusran Siry**

Jabatan : Plt. Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak kesatu**

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 April 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Kesatu
Plt. Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan


Hendra Yusran Siry

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Rupiah Miliar)	2,293
		2	Penyuluh Perikanan PNS yang Bersertifikat Kompetensi (%)	50
		3	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh (Kelompok)	47.500
		4	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok)	2.000
		5	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (Kelompok)	4.000
		6	Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Orang)	12.283
		7	Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendapatkan Perizinan Berusaha (Kelompok)	100
		8	Penyuluh yang Mendampingi Program Lintas Sektor dan Prioritas KKP (Orang)	2.100
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Desa/Kawasan Mitra yang Menerapkan Iptek (Desa)	14
		10	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	35
3	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan	11	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang Disusun (NSPK)	4
4	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	12	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	13
		13	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	100
		14	Persentase Unit Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		15	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)	81
		16	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas LK Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	≤ 0,5

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	17 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	82
	18 Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	81
	19 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	94
	20 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	93,76
	21 Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM	351.279.425.000
2.	Pelatihan dan Penyuluhan KP	102.965.225.000
Total Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024		454.244.650.000

Jakarta, 2 April 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Kesatu
Plt. Kepala Pusat Penyuluhan KP


Hendra Yusran Siry

Lampiran

Perjanjian Kinerja Pusluh KP 2024 Revisi pertama (7 Agustus 2024)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak kesatu**

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan


Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Agustus 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Kesatu
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan


Yayan Hikmayani

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Rupiah Milyar)	2,293
		2	Penyuluh Perikanan PNS yang Bersertifikat Kompetensi (%)	50
		3	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh (Kelompok)	47.500
		4	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok)	2.000
		5	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (Kelompok)	4.000
		6	Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Orang)	12.283
		7	Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendapatkan Perizinan Berusaha (Kelompok)	100
		8	Penyuluh yang Mendampingi Program Lintas Sektor dan Prioritas KKP (Orang)	2.100
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Desa/Kawasan Mitra yang Menerapkan Iptek (Desa)	14
		10	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	35
3	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan	11	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang Disusun (NSPK)	4
4	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	12	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	13
		13	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	100
		14	Persentase Unit Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		15	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)	81
		16	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas LK Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	≤ 0,5

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	82
		18	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	81
		19	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	94
		20	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	93,76
		21	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM	351.279.425.000
2.	Pelatihan dan Penyuluhan KP	102.965.225.000
Total Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024		454.244.650.000

Jakarta, 7 Agustus 2024

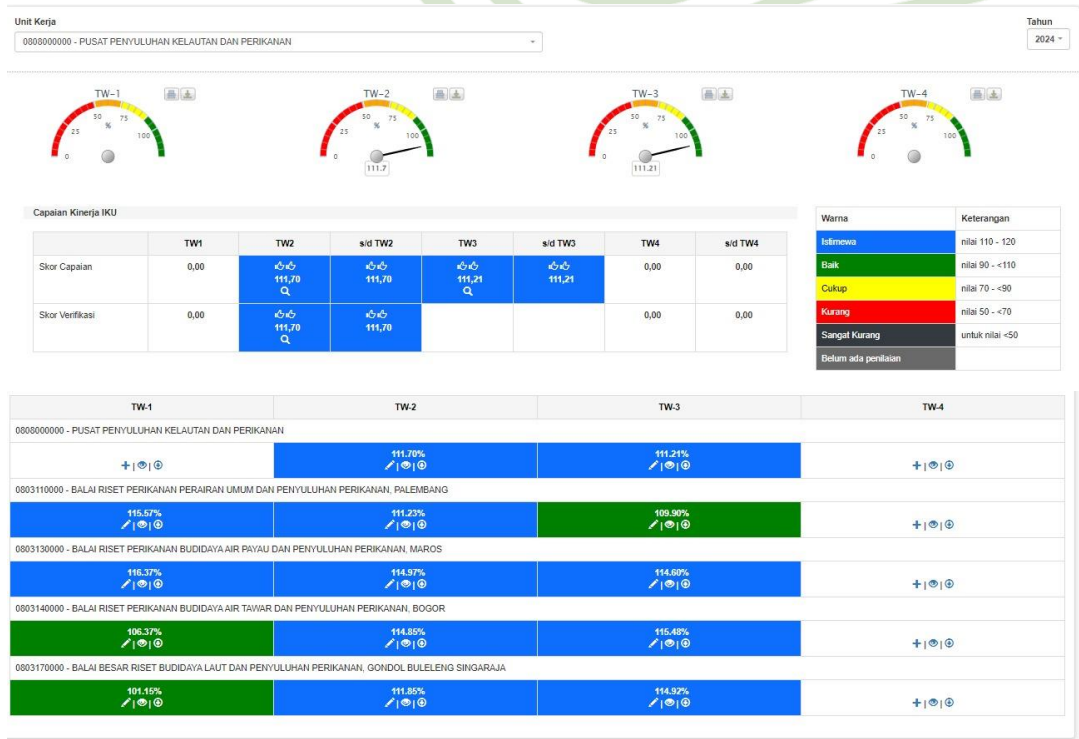
Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan


Nyoman Radiarta

Pihak Kesatu
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan


Yayan Hikmayani

Lampiran Nilai NKO Pusluh KP (Kinerjaku)



Data Dukung Kinerja Triwulan III Tahun 2024

<https://bit.ly/LKJ-PusluhKP-TW3-2024>